

LPPD 2023

KABUPATEN KAPUAS HULU



FRANSISKUS DIAAN, SH, M.H
BUPATI KAPUAS HULU

WAHYUDI HIDAYAT, S.T.
WAKIL BUPATI KAPUAS HULU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KAPUAS HULU
HEBAT!



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas ekonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

LPPD ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Capaian kinerja tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).

Pada Kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah.

Putussibau, 25 Maret 2024

Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan, S.H.,M.H.



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	24
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	82
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	86
2.1. Capaian Kinerja Makro	86
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	86
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	86
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	119
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	128
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	130
2.3.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	130
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	133
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	135
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	137
2.3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis	139
2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif/ Solusi Yang Telah Dilakukan.....	146
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	160
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	161
4.1. Urusan Pendidikan.....	161
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	161
4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	161
4.1.3. Realisasi Capaian SPM	162
4.1.4. Alokasi Anggaran	163
4.1.5. Dukungan Personil	165



4.1.6. Permasalahan dan Solusi	166
4.2. Urusan Kesehatan.....	166
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	166
4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	167
4.2.3. Realisasi Capaian SPM	168
4.2.4. Alokasi Anggaran	173
4.2.5. Dukungan Personil	175
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	175
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	178
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	178
4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	178
4.3.3. Realisasi Capaian SPM	179
4.3.4. Alokasi Anggaran	180
4.3.5. Dukungan Personil	180
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	181
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	182
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	182
4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	182
4.4.3. Realisasi Capaian SPM	183
4.4.4. Alokasi Anggaran	184
4.4.5. Dukungan Personil	185
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	185
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	186
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	186
4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	187
4.5.3. Realisasi Capaian SPM	188
4.5.4. Alokasi Anggaran	190
4.5.5. Dukungan Personil	191
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	192
4.6. Urusan Sosial	194
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	194
4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah	194
4.6.3. Realisasi Capaian SPM	195
4.6.4. Alokasi Anggaran	197



4.6.5. Dukungan Personil	198
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	199
BAB V PENUTUP	201



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Putussibau dibentuk pada tanggal 7 Januari 1953 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, yang pada tanggal 4 Juli 1959 ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Sejalan dengan semangat otonomi daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka nomenklatur Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berubah menjadi Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi



masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;



- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Data Geografis Wilayah

b.1. Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.



Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 jam 15 menit penerbangan.

b.2. Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 31.318,246 km² berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022 atau mencakup 21,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 3.900 km² merupakan daerah perairan atau tergenang (12.45 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas $\pm 10.642,236$ km² merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 16.776,01 km² atau $\pm 53,57$ % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Taman Nasional Betung Kerihun | : 8.000 km ² |
| 2. Taman Nasional Danau Sentarum | : 1.320 km ² |
| 3. Hutan Lindung | : 6.289,73 km ² |
| 4. Daerah Resapan Air | : 495,46 km ² |
| 5. Lahan Gambut | : 670,82 km ² |



b.3. Topograsi dan Iklim

1) Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Di Kabupaten Kapuas Hulu sungai masih memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Putussibau ke kota-kota lain yang berada di jalur sungai kapuas dan ke Kecamatan. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk kuali yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi.



Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2-15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%



2) Iklim

a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Di Kabupaten Kapuas Hulu curah hujan cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

b. Musim

Terdapat 2 (dua) musim di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas



Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat, dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang $\pm$ 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau.

c. Jumlah Penduduk

c.1. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 271.584 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 139.342 jiwa (51,31%) dan penduduk perempuan sebanyak 132.242 jiwa (48,68%).

Dengan luas wilayah yang mencapai 31.318,246 km², Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 8,67

jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.

c.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur kependudukan berdasarkan jenis kelamin selain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan juga digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada tahun 2023 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Putusibau Utara	14.419	13.880	28.299
2.	Bika	2.577	2.418	4.995
3.	Embaloh Hilir	3.100	2.972	6.072
4.	Embaloh Hulu	2.785	2.643	5.428
5.	Bunut Hilir	4.544	4.423	8.967
6.	Bunut Hulu	8.137	7.693	15.830
7.	Jongkong	5.849	5.730	11.579
8.	Hulu Gurung	7.387	7.067	14.454
9.	Selimbau	7.267	6.993	14.260
10.	Semtau	5.307	4.890	10.197
11.	Seberuang	6.199	5.779	11.978
12.	Batang Lumar	2.826	2.769	5.595
13.	Empanang	2.092	1.959	4.051
14.	Badau	3.806	3.653	7.459
15.	Silat Hilir	11.249	10.453	21.702

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
16.	Silat Hulu	6.387	5.859	12.246
17.	Putusibau Selatan	13.285	12.772	26.057
16.	Kalis	7.533	7.072	14.605
19.	Boyan Tanjung	7.134	6.698	13.832
20.	Mentebah	6.011	5.540	11.551
21.	Pengkadan	5.045	4.826	9.871
22.	Suhaid	5.148	4.971	10.119
23.	Puring Kencana	1.255	1.182	2.437
	JUMLAH	139.342	132.242	271.584

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023.

Dari Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 105,37 %. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,85%.

c.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui struktur usia penduduk maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi angka rasio ketegantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2023 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 191.936 jiwa atau 70.67 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (usia <15 tahun ditambah dengan usia >65 tahun) sebanyak 79.648 jiwa atau 29.33 persen,

sehingga angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 adalah sebesar 41,50 hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42 orang penduduk usia non produktif. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	18.489	6,81%
2.	5 - 9 Tahun	23.594	8,69%
3.	10 - 14 Tahun	25.275	9,31%
4.	15 - 19 Tahun	21.906	8,07%
5.	20 - 24 Tahun	25.264	9,30%
6.	25 - 29 Tahun	21.551	7,94%
7.	30 - 34 Tahun	20.750	7,64%
8.	35 - 39 Tahun	21.643	7,97%
9.	40 - 44 Tahun	22.317	8,22%
10.	45 - 49 Tahun	18.928	6,97%
11.	50 - 54 Tahun	16.365	6,03%
12.	55 - 59 Tahun	12.233	4,50%
13.	60 - 64 Tahun	9.377	3,45%
14.	65 - 69 Tahun	6.197	2,28%
15.	70 - 74 Tahun	3.748	1,38%
16.	> 75 Tahun	3.947	1,45%
	Jumlah	271.584	100,00%

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023.

c.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan diperlukan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan jenis pendidikan yang mendominasi suatu wilayah. Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 20.93% atau sejumlah 56.836 jiwa, lebih lanjut disampaikan



jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	56.836	20.93
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	41.471	15.27
3.	Tamat SD/Sederajat	71.352	26.27
4.	SLTP/Sederajat	39.815	14.66
5.	SLTA/Sederajat	46.965	17.29
6.	Diploma I/II	1.474	0.54
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.816	1.41
8.	Diploma IV/Strata 1	9.553	3.52
9.	Strata 2	296	0.11
10.	Strata 3	6	0.00
	Jumlah	271.584	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Putussibau Utara	17	2
2.	Putussibau Selatan	14	2
3.	Silat Hilir	13	-
4.	Silat Hulu	14	-
5.	Hulu Gurung	15	-
6.	Bunut Hulu	15	-
7.	Mentebah	8	-
8.	Bika	8	-
9.	Kalis	17	-
10.	Embaloh Hilir	9	-
11.	Bunut Hilir	11	-



No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
12.	Boyan Tanjung	16	-
13.	Pengkadan	11	-
14.	Jongkong	14	-
15.	Selimbau	17	-
16.	Suhaid	11	-
17.	Seberuang	15	-
18.	Semitau	12	-
19.	Empanang	6	-
20.	Puring Kencana	6	-
21.	Badau	9	-
22.	Batang Lupa	10	-
23.	Embaloh Hulu	10	-
	Jumlah	278	4

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2023 (BPS Kapuas Hulu)

e. Jumlah Perangkat Daerah , Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasiskan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fransiskus Diaan, S.H., M.H. dan Wahyudi Hidayat, S.T., merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih sebagai hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2/PL.02.7-Kpt/6106/KPU-Kab/1/2021 tanggal 22 Januari tahun 2021 tentang penetapan

pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menurut urusan yang dilaksanakan dan dasar hukum.

Tabel 1.5

Nomenklatur Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021	- Pendidikan - Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021	- Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan KB
3	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021	- Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Sosial, Pember-dayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021	- Perindustrian - Tenaga Kerja - Transmigrasi
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021	- Pertanian - Pangan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021	Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021	- Komunikasi dan Informasi - Statistik - Persandian
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021	Penanaman Modal
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021	- Kepemudaan dan Olahraga - Pariwisata
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021	- Perpustakaan - Kearsipan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021	Kelautan dan Perikanan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021	Perencanaan, penelitian dan pengembangan



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
21	Badan Keuangan dan Asset Daerah	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Inspektorat	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021	Pengawasan dan Perencanaan Keuangan
24	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021	- Administrasi Pemerintahan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021	Administrasi Pemerintahan
26	Badan Pengelola Perbatasan	Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 .	Administrasi Pemerintahan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021	Administrasi Pemerintahan Umum
28	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
29	Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
30	Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah membentuk Unit Perangkat Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT) berjumlah 542 unit kerja, adapun Nomenklatur UPT sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6
Nomenklatur Unit Perangkat Daerah
(Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	UPT. Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017	1 unit kerja
2	UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022	1 unit kerja



No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
3	UPT. Pembenihan, Pembibitan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017	1 unit kerja
4	UPT. Benih Ikan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017	1 unit kerja
5	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022	1 unit kerja
6	UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022	23 unit kerja (di 23 Kecamatan)
7	UPT. Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	- Pendidikan Usia Dini sebanyak 22 unit kerja - Pendidikan Dasar sebanyak 490 unit kerja
8	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022	1 unit kerja
10	UPT. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017	1 unit kerja

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang melekat pada urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Penunjang.

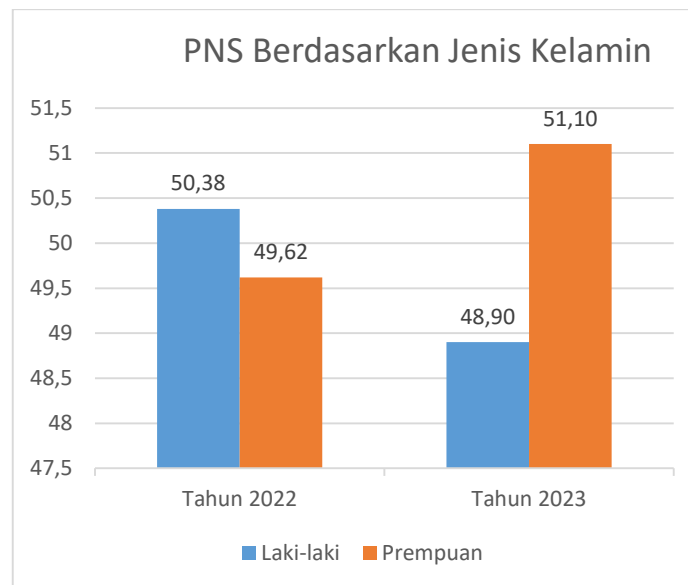
Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Desember 2023, yang merupakan deskripsi PNS dari kategori Jenis Kelamin, Golongan Ruang Kepangkatan dan Pendidikan Formal.

1) PNS Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun

2023 berjumlah 4.337 orang yang terdiri dari 2.121 orang laki-laki dan 2.216 orang perempuan. Gambar berikut menunjukkan bahwa prosentase jumlah PNS perempuan lebih besar yaitu sebesar 51,10%, dan persentase jumlah PNS laki-laki sebesar 48,90%

Gambar 1.1.

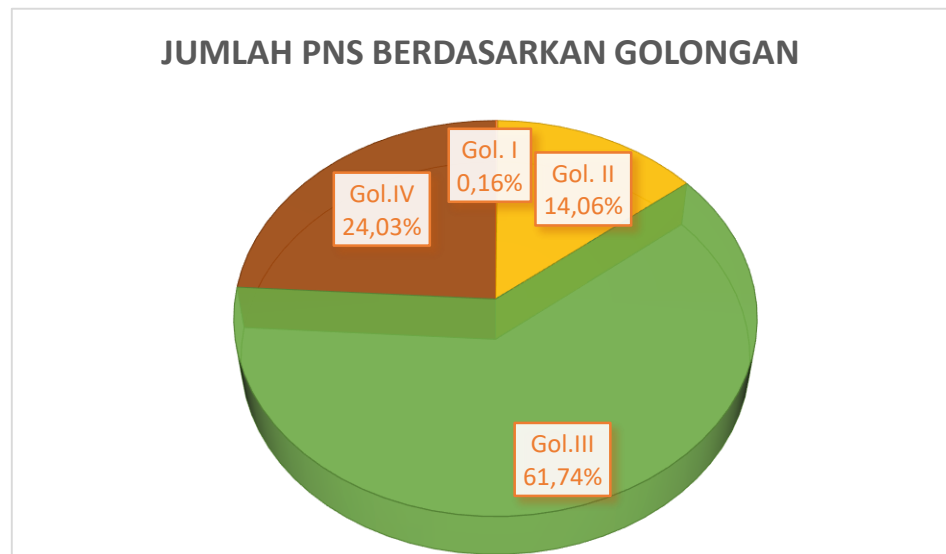


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu Desember 2023.

2) PNS Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

Pada Tahun 2023 PNS dengan Golongan III merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak orang atau sebesar 59.51% dari jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian secara berturut-turut adalah Golongan III sebanyak 2.678 orang (61,75%) Golongan IV sebanyak 1.042 orang (24,03%) Golongan II sebanyak 610 orang (14,06%), dan Golongan I sebanyak 7 orang (0,16%). Distribusi Golongan Ruang Kepangkatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.2.

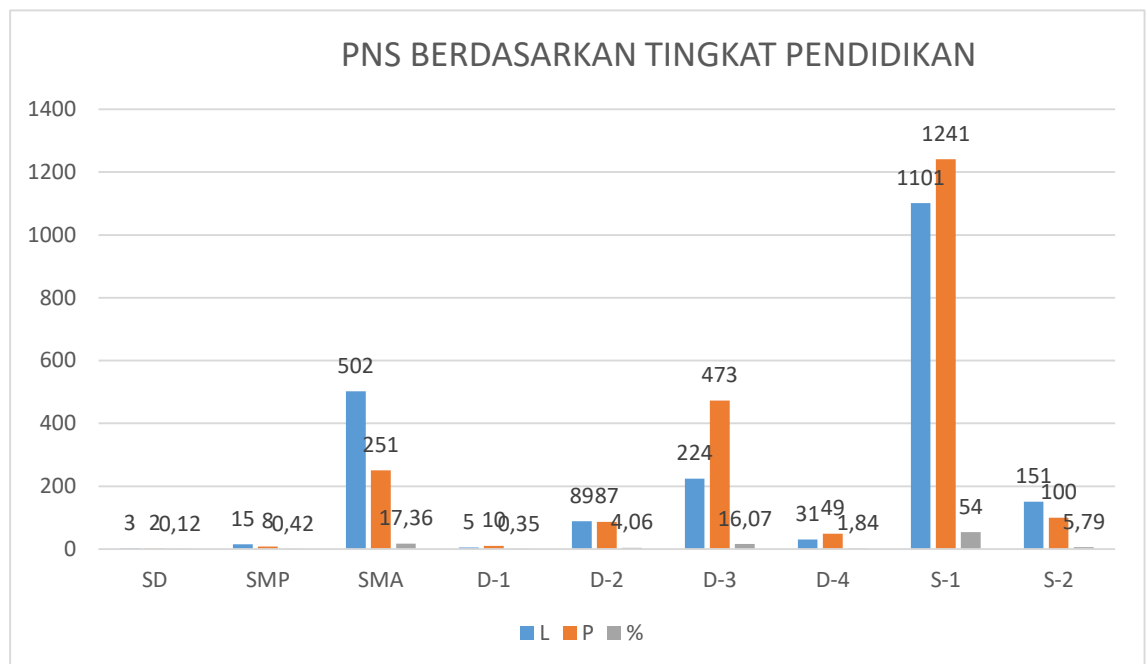


*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu Desember 2023*

3) PNS Menurut Pendidikan Formal

Pada akhir Desember 2023, PNS yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (0.12%), selanjutnya secara berturut-turut PNS berpendidikan SMP sebanyak 18 orang (0.42%), SMA sebanyak 753 orang (17,36%), D1 sebanyak 15 orang (0,35%), D2 sebanyak 176 orang (4,06%), D3 sebanyak 697 orang (16.07%), dan D4 sebanyak 80 orang (1,84%), S1 sebanyak 2.342 (54,00%) S2 sebanyak 251 orang (5,79%). Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Desember 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

f.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian Keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan Keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

f. 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

f.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pada tabel 1.7. disampaikan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut.



Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.740.301.847.350,33	1.723.714.070.976,12
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.625.985.965,70	73.399.678.892,73
4.1.01.	Pajak Daerah	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32
4.1.02.	Retribusi Daerah	6.177.650.000,00	5.984.615.864,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.371.160.690,00	17.469.034.435,62
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	30.127.256.018,70	31.753.158.356,79
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	490.788.549,77
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	9.561.230.230,00
5.	BELANJA DAERAH	1.766.688.951.566,00	1.711.167.248.686,15
5.1.	BELANJA OPERASI	1.121.242.287.539,00	1.071.113.056.041,29
5.1.01.	Belanja Pegawai	562.013.334.092,00	534.539.096.164,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.022.005.495,00	403.924.146.279,47
5.1.05.	Belanja Hibah	134.097.755.952,00	131.751.463.597,82
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.109.192.000,00	898.350.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.445.021.186,86
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.149.127.380,00	25.352.951.448,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.028.832.440,00	6.896.293.040,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	3.735.259.000,00	3.735.259.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.387.104.215,67)	12.546.822.289,97
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.675.622.215,56	13.675.622.215,56
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.711.482.000,11)	26.222.444.505,53

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan per 31 Desember 2023 (unaudited) di keluarkan tanggal 15 Februari 2024

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa yang akan datang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Adapun Renstra dan Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target

pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

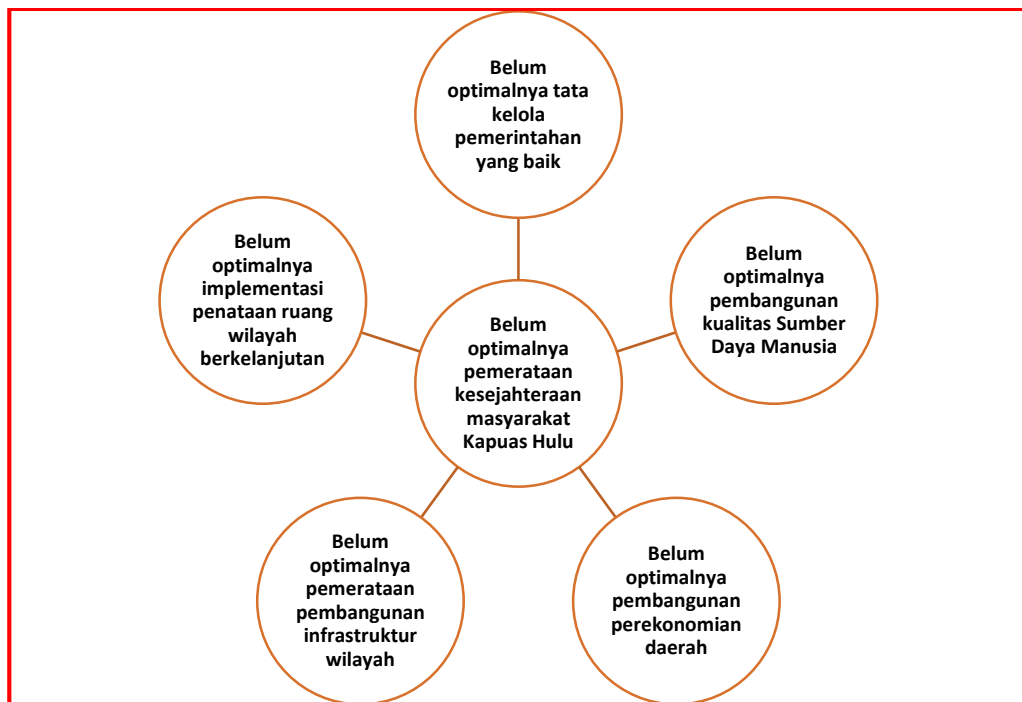
Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
- d. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.4
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain:



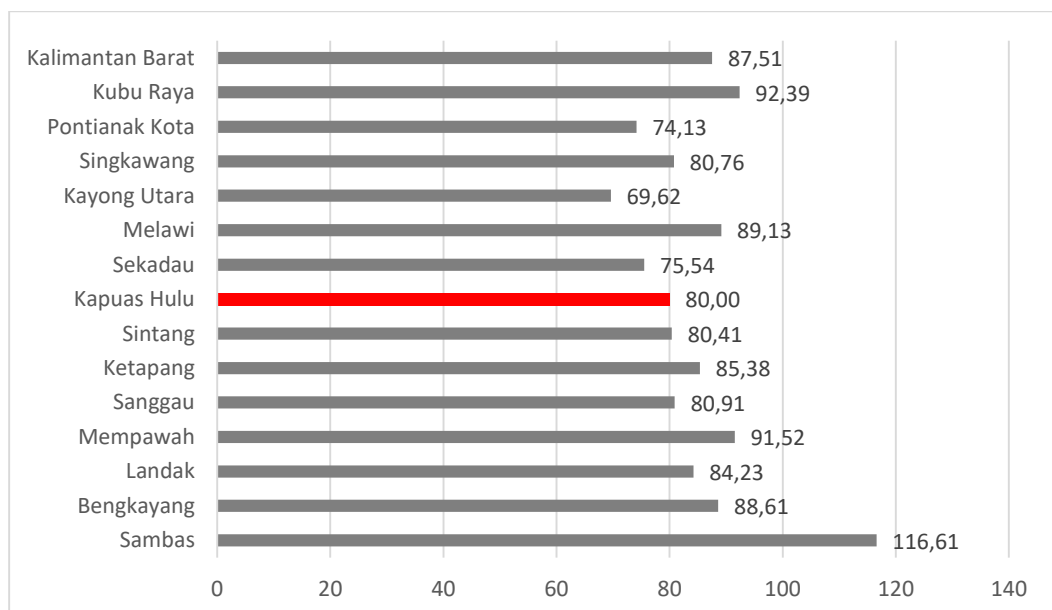
Belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal

upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.

Gambar 1.5
Penyelesaian Tindak Pidana
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan pada kabupaten tertentu.

2) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat pada tahun 2023 angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota. IPM dengan capaian 67,67 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 81,03. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,82 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,20 tahun); Angka Harapan Hidup (72,88 tahun); dan Paritas Daya Beli (8055 ribu rupiah per tahun/kapita)

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan yang secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.

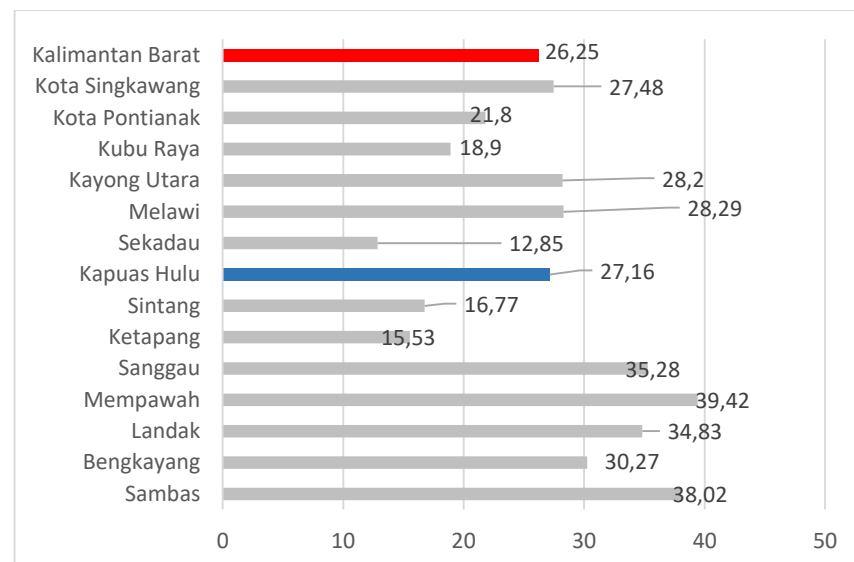
Tabel.1.8
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	IPM	RLS	HLS	AHH	PPP
Sambas	68,69	6,75	12,72	69,76	11057
Bengkayang	69,53	7,22	12,16	74,20	9859
Landak	68,14	7,24	12,53	73,77	8423
Mempawah	67,92	7,20	12,88	71,74	8690
Sanggau	67,77	7,44	11,87	71,77	9213
Ketapang	68,68	7,55	11,96	71,45	9984
Sintang	68,67	7,64	12,30	72,41	9128
Kapuas Hulu	67,67	7,82	12,20	72,88	8055
Sekadau	66,33	7,13	11,92	72,74	7981
Melawi	67,76	7,42	11,34	73,32	9155
Kayong Utara	64,79	6,35	12,12	69,22	8594
Kubu Raya	69,60	7,04	13,89	71,26	9605
Pontianak	81,03	10,45	15,04	73,87	15632
Singkawang	73,39	8,21	12,94	72,81	12457
Kalimantan Barat	69,41	7,71	12,67	71,32	9810

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

Gambar 1.6.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023



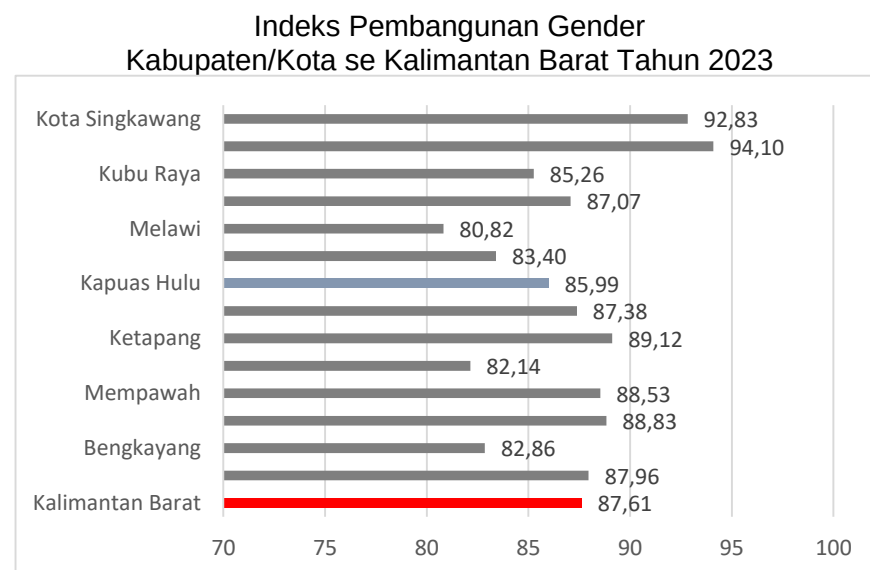
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2023

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dimana pada tahun 2023 sebanyak 27,16 persen penduduk Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan kesehatan mereka. Dari

sini terlihat kesehatan lingkungan juga masih belum cukup berkualitas sehingga menyebabkan keluhan kesehatan masyarakat cukup tinggi.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar.1.7.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

3) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

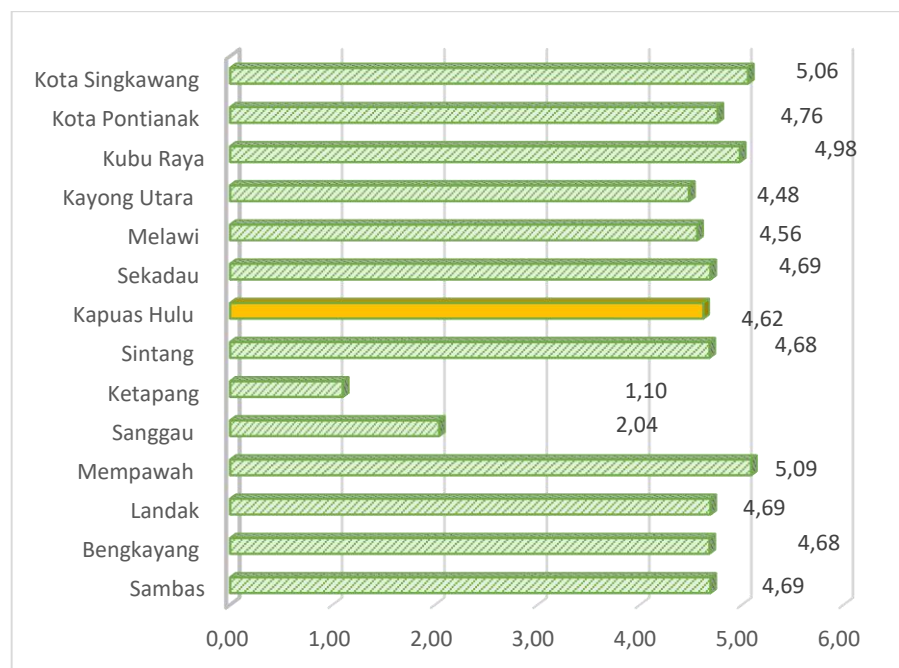
Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.

Gambar 1.8.

Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023

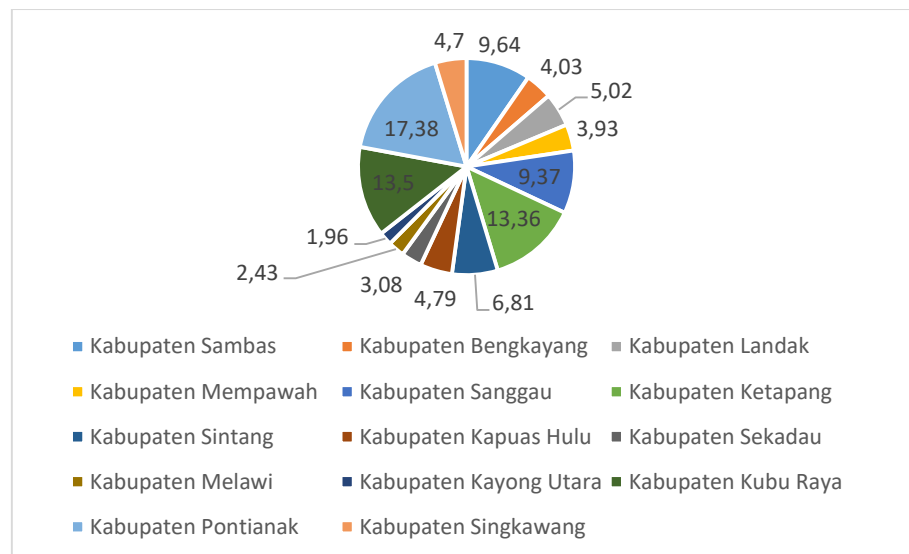


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024

Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu mencapai 4,62 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Gambar 1.9

Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023



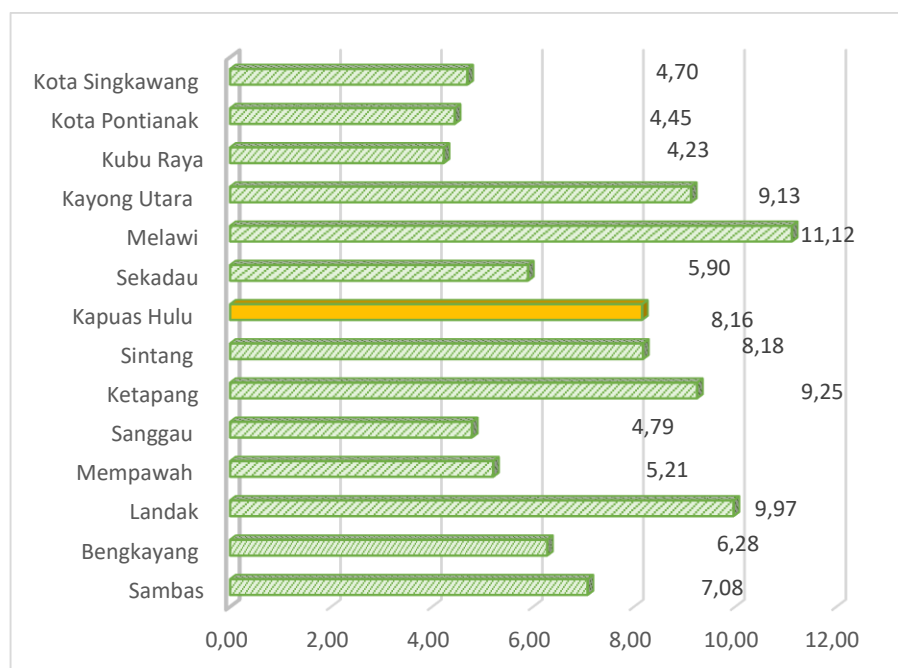
Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2024

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (8,16%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 6,73 persen. Selain masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini

akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.

Gambar 1.10
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2024

4) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala



pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparatur tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumahtangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumahtangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 69,76 persen dan akses rumahtangga terhadap air minum layak sebesar 69,00 persen.

Tabel II
Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2023

Kab/Kota	Akses Rumah Tangga Persen (%)	
	Layanan Sanitasi Layak	Layanan Sumber Air Minum Layak
Kalimantan Barat	79,89	82,10
Sambas	90,02	96,40
Bengkayang	83,76	84,90
Landak	65,24	70,10
Mempawah	81,92	87,20
Sanggau	65,96	83,50
Ketapang	80,12	67,00
Sintang	78,91	74,40
Kapuas Hulu	69,76	69,00
Sekadau	77,83	54,50
Melawi	66,24	52,00
Kayong Utara	70,59	98,60
Kubu Raya	77,79	94,40
Kota Pontianak	98,06	98,80
Kota Singkawang	88,29	90,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Tahun 2024

- 5) Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan



daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.



Tabel 1.10
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

b. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah maka isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Perumusan isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kapuas Hulu yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Tabel 1.11.
Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya pelayanan public	Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	
Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintahan	
Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
Merebaknya Pandemi COVID-19	Percepatan penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas SDM unggul
Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	
Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak	



Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal	
Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah	
Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (<i>Nature Base Solution</i>)
Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya	
Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu	
Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan
Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	
Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca	
Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam	

Dalam menginterpretasikan isu strategis tersebut, dapat dilihat pada penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1) Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi

Prioritas utama Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan



pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya.

Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Kapuas Hulu.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu dimana saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,61 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2019. Minimnya kontribusi PAD ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

2) Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalamantisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kapuas Hulu juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup



baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

3) Peningkatan kualitas SDM unggul

Sebagai daerah yang memiliki geografis sulit dan berada di perbatasan negara, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu yang lebih baik.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah



dalam pemerataan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Kapuas Hulu, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pembangunan responsif gender di Kabupaten Kapuas Hulu masih diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, khususnya di Kapuas Hulu yang masih terikat pada permasalahan *culture mindset*. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan kesetaraan gender merupakan dampak dari *culture mindset* setempat dimana beberapa budaya bagi perempuan yang menyebabkan sulit berkembang. Diharapkan ke depannya, peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dengan memberi kesempatan bagi perempuan Kapuas Hulu untuk tampil mengekspresikan diri tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya angka kemiskinan pada dua tahun terakhir menunjukkan permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian hingga mencapai 62,61 persen. Hal ini menjadi salah satu pemicu masih terjadinya fluktuasi angka kemiskinan karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih memiliki kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu sasaran program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada masyarakat petani sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang bekerja dimana sebanyak 51,68 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas lulusan SD sederajat ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.



Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Secara umum, pemerintahan di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka upaya



kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat tercapai.

5) Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (*Nature Base Solution*)

Solusi berbasis alam (NBS) mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan alam untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan. NBS merupakan solusi permasalahan pembangunan, khususnya perekonomian, yang didukung oleh alam dengan biaya yang lebih murah. Selain itu, secara bersamaan memberikan manfaat pada lingkungan, sosial dan ekonomi dan membantu membangun ketahanan.

Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, peningkatan nilai tambah pada sektor ini menjadi salah satu NBS yang dapat diimplementasikan dalam pembangaunan daerah.

NBS pada sektor ini dapat dilakukan melalui agribisnis yang merupakan suatu kesatuan dari berbagai macam usaha yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi, pengolahan hasil, dan juga pemasaran yang saling berhubungan dengan berdasar pada pertanian dalam artian yang luas. Di Kapuas Hulu, agribisnis memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan gerak perekonomian daerah. Hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik karena hasil pertanian akan meningkat nilai tambahnya dan secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat.

6) Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur



dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadikan kemandirian wilayah

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara tetangga, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dalam mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan NKRI. Bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja di daerah perbatasan yang meliputi pembangunan jalan maupun Pos Lintas Batas Negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Saat ini, Pos Lintas Batas Negara di Kapuas Hulu terdapat di Badau (PLBN Nanga Badau) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2017.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga menjadi salah satu bagian dari penguatan wilayah perbatasan karena dengan adanya perhatian dari pemerintah maka kedaulatan wilayah akan semakin tinggi dan tidak ada terjadi permasalahan yang mengindikasikan disintegrasi bangsa.



7) Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang saat ini telah menyandang status Cagar Biosfer dari UNESCO. Status yang ditetapkan secara Internasional tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan dengan status yang telah disematkan, maka terdapat beberapa keistimewaan yang akan didapatkan oleh Kapuas Hulu yang telah 100 persen masuk dalam *Hearth of Borneo* (HoB) yang menjadikannya sebagai kabupaten konservasi dimana lebih dari setengah wilayahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. Salah satu keistimewaan tersebut adalah meningkatnya kemampuan ekonomi wilayah melalui branding promosi ekowisata yang berbasis kearifan lokal masyarakat dan kekayaan sumberdaya alam lainnya. Dari sisi pembangunan, maka kawasan konservasi Kapuas Hulu akan meningkatkan poin pembangunan berkelanjutan bukan hanya di Kapuas Hulu tetapi juga pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional.

Beberapa permasalahan muncul mengingat kawasan konservasi yang akan membatasi gerak perekonomian, khususnya subsektor ekonomi pertanian dan kehutanan karena lahan maupun sumber daya alam yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harapan cukup tinggi diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat untuk tetap menjaga kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kawasan konservasi di Kapuas Hulu.

Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya baik tanah, air dan udara. Upaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan seluruh ekosistem dari

berbagai gangguan, tekanan maupun kerusakan, tak terkecuali ekosistem perairan. Diharapkan ekosistem perairan Kabupaten Kapuas Hulu nantinya akan menjadi ekosistem tangguh yang mampu beradaptasi, fleksibel, serta menghadapi perubahan dan ketidakpastian.

Beberapa ekosistem perairan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya seperti ekosistem air tawar maupun rawa gambut dimana sebagian besar berada pada kawasan konservasi

Dari sisi ketahanan wilayah, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi bencana yang tinggi sehingga status kerawanan bencana juga cukup tinggi. Intensitas bencana alam yang cukup sering menyebabkan kerugian materiil maupun kondisi psikis korban bencana. Hal ini menjadikan penanganan bencana harus diutamakan khususnya dalam meningkatkan *response rate* penanganan bencana agar lebih cepat penanganannya dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pencegahan beberapa bencana alam dapat dioptimalkan dengan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menjaga lingkungan hidup agar menjadi lebih baik.

c. Visi dan misi kepala daerah

1) Visi

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita Bupati dalam membangun sebuah daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana



pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode RPJMD 2021– 2026 adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS,
ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2) Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
- Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
- Misi 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat



d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021-2026 yaitu :

Tabel 1.12
Urusan Pemerintah Daerah dan Program

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DISPENBUD
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DISPENBUD
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DISPENBUD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DISPENBUD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINKESPPKB
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKESPPKB
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKESPPKB
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKESPPKB
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKESPPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DPUPR
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
19	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPRKPPLH
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
23	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DPRKPPLH
24	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPRKPPLH
25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKPPLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOLPP
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD KH
28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD KH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS PPKB
30	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS PPKB
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS PPKB
32	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS PPKB
33	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS PPKB
34	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS PPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
35	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
36	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERINTRANS
38	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKERINTRANS
39	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DISNAKERINTRANS
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
40	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
41	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINSOS PPKB
42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINSOS PPKB
43	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINSOS PPKB
44	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINSOS PPKB
45	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINSOS PPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
46	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DISTAN
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DISTAN
48	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DISTAN
49	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DISTAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
50	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	DPRKPPLH
51	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPRKPPLH
52	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPRKPPLH
53	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DPRKPPLH
54	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	DPRKPPLH
55	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DPRKPPLH
56	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DPRKPPLH
57	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DPRKPPLH
58	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH*****)	DPRKPPLH
59	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN*****)	DPRKPPLH
60	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN RTANAHAN*****)	DPRKPPLH
61	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN*****)	DPRKPPLH
62	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN*****)	DPRKPPLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
63	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
64	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
65	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DPRKPPLH
66	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DPRKPPLH
67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DPRKPPLH
68	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DPRKPPLH
69	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
70	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DPRKPPLH
71	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRKPPLH
72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DPRKPPLH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
73	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
74	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
75	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
76	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
77	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD
78	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD
79	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINSOSPPKB
82	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINSOSPPKB
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINSOSPPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
85	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
86	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOTIK
87	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
88	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINKOPUKMP
89	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINKOPUKMP
90	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINKOPUKMP
91	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINKOPUKMP
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINKOPUKMP
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINKOPUKMP
94	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINKOPUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
95	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
96	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
97	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
98	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
99	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPORAPAR
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORAPAR
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	DISPORAPAR
102	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFOTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
105	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPENBUD
106	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DISPENBUD
107	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DISPENBUD
108	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPENBUD
109	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DISPENBUD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERSIP
110	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINPERSIP
111	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
112	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINPERSIP
113	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINPERSIP
114	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINPERSIP
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
115	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DISKAN
116	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DISKAN
117	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DISKAN
118	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DISKAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
119	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORAPAR



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
120	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORAPAR
121	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
122	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
123	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISPANGAN
124	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISPANGAN
125	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISPANGAN
126	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISPANGAN
127	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DISPANGAN
128	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISPANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
129	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINKOPUKMP
130	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINKOPUKMP
131	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINKOPUKMP
132	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINKOPUKMP
133	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINKOPUKMP
134	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINKOPUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
135	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
136	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DISNAKERINTRANS
137	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISNAKERINTRANS
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
138	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
139	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERINTRANS
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETDA
140	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	SETDA
141	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
142	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
143	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SET DPRD
144	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SET DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA
145	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
146	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN	BAPPEDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
147	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKD
148	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKD
149	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPEGAWAIAN	BAPENDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM
150	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM
151	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BKPSDM KABUPATEN KAPUAS HULU
152	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PENGELOLAAN PERBATASAN	BAPPEDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPP
153	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	BPP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
155	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	INSPEKTORAT
156	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SETDA
157	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SETDA
158	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SETDA
160	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DPMD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAKESBANGPOL
161	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL
162	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
163	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL
165	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL



e. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yaitu :

Tabel 1.13

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Bahan/Material	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
	Pembangunan Puskesmas	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Vaksin	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
	Pengendalian Program KKBPK	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelayanan antar Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Sektor industri	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Keg. Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat	
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Adminidtrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Mebel	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peaporan Peristiwa Penting	
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Koordinasidan Penilaian Barang milik Daerah	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	
	Penyedia Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	
	Program : Penataan Desa	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	
	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	
	Program : Peingkatan Kerjasama Desa	
	Kegiatan : fasilitasi kerjasama antar desa	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	
	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Kegiatan : Administrasi Umum	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Standar Harga	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	
	Penilaian Barang Milik Daerah	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MENTEBAH
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	PENATAAN ORGANISASI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN HULU GURUNG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BADAU
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum Penerapan SPM

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, kebijakan penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu



tertentu, mendorong transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Adapun pedoman penyelenggaraan SPM yang terkait dengan mutu pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/ 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;



- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- 7) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Berkaitan dengan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kebijakan Umum SPM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya penerapan SPM di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dicapai melalui kebijakan perbaikan kualitas layanan publik, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi



merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun capaian Kinerja Makro tahun 2023 dan peningkatan atau pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,91	67,86	1.42
2	Angka Kemiskinan	8,59	8,16	-5.006
3	Angka Pengangguran	2,21	2.19	-0.905
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.804.58 (milyar)	7.118.7 (milyar)	4.616
5	Pendapatan Per Kapita	47.056 (dalam juta)	50.079 (dalam juta)	6.424
6	Ketimpangan Pendapatan	0,318	0,299	-5.975

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci keluaran (*output*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. URUSAN PENDIDIKAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Satuan pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	159	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.933		
3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.933		
4.	Jumlah kebutuhan minimal pen-didik PAUD (Negeri dan Swasta)	429		
5.	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	842		
6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S-1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	242		
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	17		
8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	456		
9.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	27.222		
10.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14.109		
11.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	27.222		
12.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.109		
13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.515		
14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.670		
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.748		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
16.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	705		
17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)	1.572		
18.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	529		
19.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	426		
20.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	132		
21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	1.511		
22.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	684		
23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	259		
24.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	76		
25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	0		
26.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat.	0		
27.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	5		
28.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	297		
29.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	297		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
30.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	155		
32.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	100		
33.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV dan S-1	66		
34.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	259		
35.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2		

2. URUSAN KESEHATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3		
3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk pelayanan antenatal yang tersedia	47.719		
4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	53		
5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan persalinan yang tersedia	9.628		
6.	Jumlah SDM kesehatan utk pelayanan persalinan sesuai standar	73		
7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan neonatal esensial yang tersedia	28.500		
8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	73		
9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan neonatal esensial	342.295		
10.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	138		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita	27.285		
12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.548		
13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia utk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	5.511		
14.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar	138		
15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun	50.860		
16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	138		
17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas	181.327		
18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	92		
19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi Kartu Menuju Bugar Anak Sekolah	35.0275		
20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	115		
21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita DM	0		
22.	Jumlah SDM kesehatan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat sesuai standar	49		
23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ Berat	34.747		
24.	Jumlah SDM kesehatan untuktk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	127		
25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita TBC	42.087		
26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV sesuai standar	151		



3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten(ha)	0	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0		
3.	Luas kawasa permukiman sepanjang pantai yang rawan abarasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	45,31 ha		
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	4968 ha		Bangunan Perkuatan Tebing
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten	Tidak Ada		
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kerenangan kabupaten	Tidak Ada		
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	489.54m		Bangunan Perkuatan Tebing
8.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	73,83		
9.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0		
10.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
11.	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	
12.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	Tidak ada		suket
13.	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggara SPAM	Tidak Ada		
14.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		suket
15.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lain	0		suket
16.	Jumlah rumah dengan akses uni pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar enggunakan SPALD-S	1973		
17.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	1270		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			
18.	Jumlah rumah dengan akses unti pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	3243		
19.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
20.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0		
21.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1973		
22.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	71.06 %		
23.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0 %		
24.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	4.02 %		
25.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	4,09 %		
26.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0		Tidak memiliki mobil tinja
27.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0		
28.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	4.02 %		
29.	Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
30.	Rasio bangunan gedung(kecuali rumahtinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0		
31.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	3		
32.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		
33.	Penetapan keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		
34.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	13 buah		
35.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk	0 buah		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kepentingan strategis daerah kabupaten			
36.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	1915 buah		
37.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	57 buah		
38.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	1106.148	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
39.	Panjang jalan yang dibangun	0		
40.	Panjang jembatan yang dibangun	0		
41.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17.476 Km		
42.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
43.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	10.444 Km		
44.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	152.5 M		
45.	Panjang jalan yang dipelihara	10.250 Km		
46.	Panjang jembatan yang dipelihara	0 M		
47.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1		
48.	Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah kab./kota	346		
49.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	262		
50.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi/cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	1		
51.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	0		
52.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab. untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0		
53.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0		
54.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
55.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		
56.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	346		
57.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab./kota yg dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.	262		
58.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten	262		
59.	Tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	0		
60.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
61.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
62.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang jadi kewenangan pengawasannya	1		
63.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
64.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
65.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wil. kabupaten	0		
66.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten	0		
67.	Jumlah badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wil. Kab.	0		
68.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
69.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	0		
70.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
71.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		

4. PERUMAHAN RAKYAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	59.860	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2.386		
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2.386		
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	15		
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	15		
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
10.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
11.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
12.	Jumlah rumah tangga penerima keg.layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
13.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
14.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
15.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
16.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	359,46		
17.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2		
18.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	229,53		
19.	Jumlah rumah di kab/kota	61.584		
20.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	270		
21.	Jumlah rumah tidak layak huni	129.29		
22.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		Belum pernah dilakukan pendataan terhadap rumah yang tidak dihuni
23.	Rasio rumah dan KK	1,43		
24.	Jumlah rumah pembangunan baru	3.686		
25.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3		
26.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
27.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	621		
28.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	621		
29.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	3		Tidak terdapat Perumahan yang terfasilitasi RTNH
30.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3		Pemasangan PJU merupakan kewenangan PLN
31.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
32.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
33.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	13	Satpolpp	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	20		Belum terdapat Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0		Sampai dengan tahun 2021 belum ada Pol PP yang memiliki sertifikat PPNS
5.	Tersedianya SOP dlm penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1		
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	26		
7.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		
9.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
10.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		
11.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,23 %		
12.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,21 %		
13.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		
14.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,73 %		
15.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0		
16.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		
17.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
18.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		
19.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	10		
20.	Tersedianya pos sektor damkar yg dilengkapi sarana prasarana damkar dan penyelamatan di kantor kecamatan	0		
21.	Tersedianya aparatur selama 24 jam yg dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		
22.	Pos Damkar yang dilengkapi dgn sarpras damkar, penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0		
23.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	523		
24.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
27.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	395		
28.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		

6. URUSAN SOSIAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	687	Dinas Sosial P3A dan P2KB	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0		tidak terdapat Disabilitas, anak dan lanjut usia terlantar
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		
4.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang dijangkau	0		
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		
6.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0		
7.	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
8.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket sandang	0		
9.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0		
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0		Belum tersedia alat bantu pada rumah singgah
11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0		Pada Dinas Sosial P3A P2KB Belum tersedia paket kesehatan untuk perbekalan
12.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		belum disediakan tenaga kesehatan untuk rumah singgah
14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0		
15.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yg mendapatkan bombing-an fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/pusat kesejahteraan sosial	0		
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	0		tidak melaksanakan bimbingan sosial
17.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0		
18.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
19.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0		
20.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0		
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		
22.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	129		
23.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	61		
24.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		tidak terdapat penampungan pengungsi milik Pemerintah Daerah
27.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		tidak terdapat kelompok rentan



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
28.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		tidak terdapat korban bencana yang membutuhkan pelayanan psikososial
29.	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawan sosial yang tersedia	94		

7. URUSAN TENAGA KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 (Ada)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dlm rencana tenaga kerja	100 %		
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0		
4.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0 %		
5.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0%		
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8.77%		
7.	Persentase LPK yang terakreditasi	0 %		
8.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%		
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	57		
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%		
11.	Persentase penyerapan lulusan	100%		
12.	Lulusan bersertifikat kompetensi	0%		
13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan peaihan	0		
14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%		
16.	Data tingkat produktivitas total	0	BPS	



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	53.66 %		
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	91.67 %		
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	12		
20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100 %		
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	76.73%		
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.26 %		
23.	Jumlah mogok kerja	1		
24.	Jumlah penutupan perusahaan	1		
27.	Jumlah perselisihan kepentingan	0		
28.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
29.	Jumlah perselisihan PHK	4		
30.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	173		
31.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	170		
32.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kab./kota yg diberdayakan	1		
33.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	75 %		
34.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	151		
35.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	94		
36.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4		
37.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab./kota	5		
38.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1		Tidak terdapat Pejabat



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Fungsional Pengantar Kerja
39.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		Tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten
40.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	4		
41.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	45		
42.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
43.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yg terdata	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
44.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
45.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
46.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
47.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab./kota yg telah dilatih PUG	0	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	
2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada PD yg sudah dievaluasi melalui analisis gender di tk. Kab./kota	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		
4.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0		
5.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %		
6.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0		
7.	Jumlah lembaga layanan anak yg mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota	0		
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab./kota yg mendapatkan pelatihan	0		
9.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0		
10.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		
11.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
12.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1		
13.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0		
14.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%		

9. URUSAN PANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	6		
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	6		
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1		
6.	Tertanganinya kerawanan pangan	4		
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0		
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	12		

10. URUSAN PERTANAHAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	87.448		sejak tahun 2018, izin lokasi diterbitkan OSS (pusat)
2.	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absntee dan Daftar Subyek	100		
3.	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	2.36		
4.	Dokumen Izin membuka tanah	0		
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100		

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKD) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	58,89 94,76 89,63	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	19,13		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pem.kab./kota	100		
4.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab./Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemkab.kota	10		
5.	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	36,36		
6.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		Tidak ada Kegiatan Pelatihan bagi MHA dan Lembaga Masyarakat
7.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemkab./kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab./kota yang ditangani	100		

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Penerbitan akta perkawinan	79.920	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	Penerbitan akta perceraian	1.035		
3.	Penerbitan akta kematian	6.688		
4.	Penyajian data kependudukan	3		

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	173		Pada Tahun 2020 Tidak terdapat fasilitasi kerjasama antar Desa
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		Hanya terdapat 3 Desa pada tahun 2019 yang melaksanakan kerjasama antar Desa
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	58		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	173		

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	-	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pada Tahun 2022 belum terdapat Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan
2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,6		
3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	36		
4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	61.23 %		
5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	52.386		
6.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	96,97		
7.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,41		
8.	Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	238		
9.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	43,33		
10.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	6,12		
11.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	69,2		



15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100 %	Dinas Perhubungan	
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	25,09 %		
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100		Belum ada Perda/Perbup tentang Tarif Angkutan
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	0 %		

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0 %	Dinas Kominfo dan statistik	Tidak terdapat Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau yang menggunakan akses internet yang diamankan oleh Dinas Kominfo
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	2		
3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0		
4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0		
5.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	62 %		
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplemen-tasikan layanan	24 %		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan se-suai dgn ketentuan per-UU-an			
7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dalam dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik	75		
9.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	25		
10.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	68,75 %		
11.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn sistem penghubung layanan pemerintah	20		
12.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	4		
13.	Persentase PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	4		
14.	Persentase PD yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	54		
15.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	3,7		
16.	Persentase PD yg mengimplementasi inovasi yg mendukung smart city	0 %		
17.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0%		
18.	Tersedianya Perda atau Perkada terkait implementasi e-government	1		
19.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pem.Prov. yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pem.Kab.	100 %		
20.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	18,18 %		
21.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	60 %		



17. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm kab./kota	0 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %		
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	43,17		
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	48,78		
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,39		
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	0,05 %		
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian utk koperasi dgn wil. keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,39		
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0 %		
9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab. /kota	24,46 %		
10.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab./kota	0%		
11.	Persentase yg diberikan dukungan fasilitasi pemasaran utk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,79 %		
12.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %		
13.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk	10,79 %		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
14.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	6,86 %		
15.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	13,8 %		
16.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0		
17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi dan sertifikasi produk usaha standarisasi	0		
18.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0		
19.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,61 %		
20.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0		

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Belum ada PERDA tentang pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada SOP tentang pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	1		
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	62		
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.031		OSS (UMK 567 Izin, Non UMK 130) dan Sicantik 498



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	Laporan realisasi penanaman modal	1.404.128 M		
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	2		
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	30		
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	40		

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
3.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesuka-relawanan dan kepeloporan pemuda	0		
4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
5.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	228		
6.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7		

20. URUSAN STATISTIK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya buku profil daerah	Tidak	Dinas Kominfo dan statistik	Belum terdapat Buku Profil Daerah
2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2		Belum pernah dilaksanakan survey statistik sektoral
3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	442		
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2		Belum Pernah dilaksanakan survey statistik sektoral



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2		
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100 %		
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100 %		

21. URUSAN PERSANDIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	0		
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0		
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	50		

22. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	13		
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	13		
4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yg dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	13		Pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan kapasitas bagi penjaga situs



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1		
6.	Perlindungan cagar budaya kab./kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
7.	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	tidak ada		
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	40		
9.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	13		
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	tidak ada		Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki museum
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	tidak ada		
12.	Peningkatan akses masyarakat dlm pengelolaan sarana dan prasarana museum dan pelaksanaan kegiatan museum Kabupaten / Kota	tidak ada		
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	tidak ada		
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	tidak ada		
16.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	tidak ada		

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	7,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,29 %		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,003 %		
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,917 %		
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6215		
6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		Belum ada naskah kuno yang dialih aksara dan bahasa
8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		

24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %		
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
4.	Persentase jumlah arsip yg dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	20.523		Pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan Pemusnahan Arsip akibat bencana sesuai NSPK
6.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1		
7.	Penyelamatan arsip PD Kab./Kota yg digabung dan/ dibubarkan dan pemekaran daerah/kecamatan/ kelurahan/desa yang sesuai NSPK di Kabupaten	1		
8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yg dikelola oleh lembaga kearsipan kab. yg sesuai NSPK	Tidak Ada		
9.	Pencarian arsip statis yg pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab. yang dinyatakan hilang dlm bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab. yang sesuai NSPK	Tidak Ada		

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	25	Dinas Perikanan	
2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100		
3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab./kota yang diterbitkan	81		
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	14		
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	1.120.097		

26. URUSAN PARIWISATA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	33		
2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	5		
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	1		
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	9.821		Wisatawan Mancanegara tidak didata berdasarkan Kebangsaan
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11		
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0		
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	294		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	33		
9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0		
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		

27. URUSAN PERTANIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	138	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	1.198		
3.	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	21		Pada Tahun 2021 tidak terdapat fasilitasi izin usaha pertanian
4.	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100 %		
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	100 %		Pada Tahun 2021 tidak terdapat usulan izin usaha pertanian
6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	97 %		Bencana yg dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular

28. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perizinan yg diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0 0 0		
2.	Persentase penerbitan TDG	0	Dinas PTSP	
3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		
4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
5.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0		
6.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		
7.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab.	0		
8.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0		
9.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0		
10.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		
11.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	631.600		
12.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	23,17%		
13.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		

29. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	30 %		
3.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %		
4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	13,2		



30. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	20	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	20		
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	4		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah hasil yang dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan hasil aktual atau yang diharapkan dari barang/jasa/kegiatan/layanan yang telah dihasilkan, berupa peningkatan kuantitas/kualitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan atau peningkatan pendapatan. Indikator hasil dijadikan landasan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dlm PAUD	68,225 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,503%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 th yg berpartisipasi dlm pendidikan menengah pertama	94,532%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,428%		
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	1,255	Dinas kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100 %		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	60,992 %		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	72,058 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,679 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	64,905%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,182%		
		Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,957%		
		Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,623%		
		Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,427%		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		
		Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		
3.	Pekerjaan Umum	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten.	-	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	
		Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	13.132 %		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	73,824 %		
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	57,566 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,728 %		
		Rasio Kepatuhan IMB	100 %		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	68,079 %		
		Rasio tenaga Operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat Kompetensi	100 %		
		Rasio Proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	97,368 %		
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	0		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	63,854 %		
		Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	20,994 %		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1,008		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	100 %		
		Persentase PERDA dan PERKADA yg ditegakkan	100 %		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	100		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,466		
		jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100		
		persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		
		waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4,78		
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar dan gepeng yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	57,699 %	Dinas Sosial, Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab.	0,417 %		
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.865 %		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	34.991.643,728		
		Persentase perusahaan yg menerapkan tatakelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)	78,048 %		
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	47,872 %		
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %		
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,667 %		
9.	Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dgn peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		Persentase Penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum	100		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100		
		Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	28,05		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100		
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	80,15		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	19,130 %		
		Ketaatan Penanggung-jawab usaha dan/atau keg. thd izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0		Tidak Ada Pelanggaran
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	97,153 %	Dinas Kependuduk-an dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71,971 %		
		Kepemilikan akta kelahiran	99,286 %		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	4 %		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100 %	Dinas Pem-berdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2,142 %		
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	1,6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	72,701 %		
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,884 %		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	0,81 %	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0,25		
16	Komunikasi Dan Informatika	persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	2 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Persentase Layanan Publik yang diseleng-garakan secara online dan terintegrasi	14.285 %		
		persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui ke-bijakan dan program prioritas pemerintah dan Pem.Kab.	100 %		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
17	Koperasi Usaha Kecil Menengah	peningkatan koperasi yang berkualitas	26,618 %	Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
		meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	25,375 %		
18	Penanaman Modal	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-52,792 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan Dan Olahraga	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,703 %	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepe-mudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,303 %		
		peningkatan prestasi olahraga	39		Tahun 2020 Tidak ada Event Olahraga dikarena-kan Pandemi Covid-19
20	Statistik	persentase Perangkat Daerah yang meng-gunakan data statistik dlm menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		persentase Perangkat Daerah yang meng-gunakan data statistik dlm melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %		
21	Persandian	tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	5,271	Bagian Umum Sekre-tariat Daerah	Tidak me-laksanakan kegiatan persandian
22	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	100 %	Dinas Pen-didikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum terdapat data
		indeks pembangunan literasi masyarakat	58,36		Belum terdapat data
24	Kearsipan	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabi-litas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggung jawaban nasional (Psl. 40 dan Psl. 59 UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab-	50		Belum terdapat data



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
25	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab./Kota di wil.Provinsi (sumber data : one data KKP)	100,796	One Data KKP	
26	Pariwisata	persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	110,615%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan wisatawan nusantara yg datang ke Kabupaten	167,850 %		
		tingkat hunian akomodasi	16,871 %		Berdasarkan data tingkat Hunian akomodasi Disporapar Bidang Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah kamar tersedia dan kamar terjual sebesar 015.007
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab. (harga berlaku)	1,912		dalam jutaan rupiah
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab. (harga berlaku)	3,969		Diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada LRA APBD tahun 2021
27	Pertanian	produktivitas pertanian per hektar per tahun	225,215	Dinas Pertanian dan Pangan	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun berdasarkan Data ATAP Prov. Kalbar sebesar 29,02 kw/ha dengan perhitungan Jumlah produksi pertanian pangan per tahun dibagi luas panen (tanpa dibagi



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
					perhektar pertahun dan dikali 100%)
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-58,536 %		Peningkatan kejadian penyakit/kasus pada tahun 2021 karena terjadi wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang hewan Babi yang mana tingkat kematiannya hingga 100%. selain itu juga penyakit rabies yang masih ada terjadi di Kapuas Hulu.
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0 %	Dinas Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0 %		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25,375 %		
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	82,389 %	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	23,171 %		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	5,589 %	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yg lokasinya di daerah Kabupaten	35,251		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,460 %	Badan Keuangan Daerah	
		Rasio PAD	4,258 %	Badan Keuangan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Kabupaten	
		peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Kabupaten	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	54,483 %	Badan Keuangan Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	10	Inspektorat Kabupaten	
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yg dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn Metode Kompetitif	58,858 %		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	50,853 %		



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	80,045		
3.	Kepegawaian	Rasio PNS Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82,107 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio PNS Fungsional (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,496 %		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,479 %		
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,433 %	Badan Keuangan Daerah	Tidak Terjadi Deviasi
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,997 %		Tidak Terjadi Deviasi
		Assets Management : 1. Apakah ada Daftar Aset tetap?	Ada		
		2. Apakah ada manual utk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
		4. Apakah nilai asset tercantum dlm laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,652		
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	88,781 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		akses publik terhadap informasi keuangan daerah	76,100 %		



2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran, Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target realisasi indikator dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD.

2.2.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.



Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Adapun Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
1. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2. Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	80
3. Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3. Indeks Resiko Bencana	124,06
4. Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	72
5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,20 %
	6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,8 %
	7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,38 %
	8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,88 %
6. Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9. Jumlah Desa Mandiri	49 desa



Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
7. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,92 %
8. Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	13,46 %
9. Meningkatnya Investasi Daerah	12. Nilai Realisasi Investasi	569,18 milyar
10. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13. Persentase Usaha Mikro	93,12 %
	14. Persentase Koperasi Aktif	41,63 %
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,64
12. Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16. Persentase RDTR	26,09 %
13. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,66 tahun
14. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,07 tahun
15. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19. Angka Harapan Hidup	73,02 tahun
16. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20. Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7.601
17. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21. Nilai SAKIP	BB
18. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,73
19. Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini BPK	WTP
20. Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24. Predikat SPBE	Baik
21. Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25. Predikat KIP	Informatif
22. Meningkatnya Maturitas SPIP	26. Level Maturitas SPIP	3
23. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dan Profesional	27. Indeks Profesionalitas ASN	48,50
24. Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten	28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	70 %



Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
25. Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa	29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	63 %
26. Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	81,00 %
27. Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	77,30 %
28. Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	77,66 %
29. Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %
30. Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	50,15 %
31. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	35. Resiko Konektivitas Kabupaten	66,00
32. Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	77
33. Meningkatnya Mutu Fasyankes Dasar dan Rujukan	37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	72



2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, berdasarkan target perjanjian kinerja pada Tahun 2023, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 pada Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Tahun Sebelumnya		Tahun 2023		Akhir RPJMD (2026)	
				2022	Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31		95			96,08	0,00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4,51	2	4,62	231,00	5	92,40
2.2	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	19,06	17,63	28,42	161,19	24,1	117,91
2.3	1. Tingkat Kemiskinan	%	8,33	8,59	7,83	8,16	95,79	7,08	84,75
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,18	2,21	3,51	2,19	137,61	3	127
2.4	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100.00	Baik	
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	66,91	67,64	67,86	100,33	69,17	98,11
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B	CC	B	96,51	A	84,45
4.2	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	-	76,49	71,79	93,86	83,83	85,64



E MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat									
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Score	0	83,5	74,5	83,5	112,08	82,5	101,21
						Rata-Rata Capaian Kinerja	125,37		87,94



Tabel. 3.3

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 pada Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
A	MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan								
1	1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00
	2 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	79,11	80		0,00	88	0,00
	3 Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	138,7	124,06	141,01	86,34	116,3	78,75
	4 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	80,25	72		0,00	80	0,00
B	MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi								
1	5 LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	4,26	1,2	2,14	178,33	1,5	142,67
	6 LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	13,44	1,8	9,68	537,78	4,2	230,48
	7 LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,98	2,71	5,38	0,44	8,18	5,98	7,36
	8 LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9		2,88	0	0,00	5,58	0,00
2	9 Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	53	49	79,00	161,22	67	117,91
3	10 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	35,43	33,28	36,92	30,72	83,21	39,12	78,53
	11 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	2,02	13,46	2,87	21,32	20,82	13,78



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
	12 Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	2.974	569,18	1.404,13	246,69	620,2	226,40
	13 Persentase Usaha Mikro	%	92,56	99,96	93,12	99,93	107,31	93,72	106,63
	14 Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	40,96	41,63	46,49	111,67	51,36	90,52
4	15 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	78,07	74,64	80,15	107,38	75,05	106,80
	16 Persentase RDTR	%	4,35	4,35	26,09	4,35	16,67	65,22	6,67
C	MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing								
1	17 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,14	12,66	12,2	96,37	13,04	93,56
	18 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,59	8,07	7,8	96,65	8,54	91,33
	19 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,69	73,02	72,88	99,81	73,51	99,14
	20 Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7162	7.668	7.601	8.055	105,97	7.963	101,16
D	MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas								
1	21 Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	96,51	A	84,45
	22 Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	80,3	81,56	80,73	82,74	102,49	81	102,15
	23 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
	24 Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	102,96	Baik	92,67
	25 Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100,00	Informatif	100



LPPD 2023
Kabupaten Kapuas Hulu
Akhir RPJMD
(2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
					Target	Capaian	%	Target	%
2	26 Level Maturitas SPIP	Level	3	2,655	3	3,01	100,33	3	100,33
	27 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	38,14	48,5	41,3	85,15	50	82,60
	28 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	67,1	70	69,08	98,69	79	87,44
	29 Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	29,79	63	30,21	47,95	69	43,78
	30 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	%	78,76	56,73	81	57,57	71,07	87,03	66,15
	31 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	74,46	45,73	77,3	76,73	99,26	82,64	92,85
	32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	72,28	77,66	73,83	95,07	86,66	85,20
	33 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	0	100	100	100,00	100	100,00
	34 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	3,78	50,15	63,85	127,32	69,05	92,47
	35 Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	69,21	66	69	104,55	80,7	85,50
E	MISI 5 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu Bagi Masyarakat								
1	36 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	Score		82,38	77	82,66	107,35	85	97,25
	37 Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	Score		83,5	72	82,26	114,25	80	102,83
Rata-Rata Capaian Kinerja							112,29		91,39



Tabel. 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	80		%
3. Indeks Resiko Bencana	124,06	141,01	86,34%
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	72		%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,20%	2,14%	178,33%
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80%	9,68%	537,78%
7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,38%	0,44%	8,18%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,88%	-	-
9. Jumlah Desa Mandiri	49 desa	79	161,22%
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,92%	30,72%	83,21%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	13,46%	2,87%	21,32%
12. Nilai Realisasi Investasi	569,18 milyar	1.404,13 milyar	246,69%
13. Persentase Usaha Mikro	93,12%	99,93%	107,31%
14. Persentase Koperasi Aktif	41,63%	46,49%	111,67%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,64	80,15	107,38%
16. Persentase RDTR	26,09%	4,35%	16,67%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,66 tahun	12,20 tahun	96,37%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,07 tahun	7,80 tahun	96,65%
19. Angka Harapan Hidup	73,02 tahun	72,88 tahun	99,81%
20. Pengeluaran Perkapita	7.601.000 Rp/ kapita/thn	8.055.000 Rp/ kapita/thn	105,97%
21. Nilai SAKIP	BB	B	96,51%
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,73	82,74	102,49%
23. Opini BPK	WTP	-	-
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	102,96 %
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100 %
26. Level Maturitas SPIP	3	3,010	100,33%
27. Indeks Profesionalitas ASN	48,5	41,3	85,15%
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	70%	69,08%	98,69%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	63%	30,21%	47,95%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	81%	57,57%	71,07%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	77,30%	76,73%	99,26%
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	77,66%	73,83%	95,07%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	100%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	50,15%	63,85%	127,32%
35. Rasio Konektivitas Kabupaten	66	69	104,55%
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	77	82,66	107,35%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	72	82,26	114,25%

Berdasarkan tabel diatas dalam rata - rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 112,29%, Meskipun secara makro tercapai 100% lebih, namun masih ada beberapa beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target Tahun 2023 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 4 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercapai 8,18%, Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih tercapai 21,32%, Persentase RDTR tercapai 16,67%, Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap tercapai 47,95%.

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai target kinerja sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara spesifik tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran tahun sebelumnya disebabkan adanya perbedaan tujuan dan sasaran indikator pada periode RPJMD 2021-2026. Untuk memberikan gambaran umumnya terhadap pencapaian sasaran indikator tahun 2023 maka akan diperbandingkan dengan data awal periode RPJMD 2021-2026.

Berikut disampaikan perbandingan hasil capaian indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel. 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Progres
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	0%
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	80	79,11		%
3. Indeks Resiko Bencana	124,06	138,70	141,01	1,67%
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	72	80,25		%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,2 %	4,26 %	2,14 %	-49,77%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,8 %	13,44 %	9,68 %	-27,98%
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,38 %	2,71 %	0,44%	-83,76%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,88 %	0 %	%	%
9. Jumlah Desa Mandiri	49 desa	53 desa	79 desa	49,06%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Progres
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,92 %	33,28 %	30,72 %	-7,69%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	13,46 %	2,02 %	2,87%	42,08%
12. Nilai Realisasi Investasi	569,18 Milyar	2.974,39 Milyar	1.404,13 Milyar	-52,79%
13. Persentase Usaha Mikro	93,12 %	99,96 %	99,93 %	-0,03%
14. Persentase Koperasi Aktif	41,63 %	40,96 %	46,49 %	13,50%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,64	78,07	80,15	2,66%
16. Persentase RDTR	26,09 %	4,35 %	4,35 %	0%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,66 tahun	12,14 tahun	12,20 tahun	0,49%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,07 tahun	7,59 tahun	7,80 tahun	2,77%
19. Angka Harapan Hidup	73,02 tahun	72,69 tahun	72,88 tahun	0,26%
20. Pengeluaran Perkapita	7.601.000 Rp/ Kapita/Thn	7.668.000 Rp/ Kapita/Thn	8.055.000 Rp/ Kapita/Thn	5,05%
21. Nilai SAKIP	BB	B	B	0%
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,73	81,56	82,74	1,45%
23. Opini BPK	WTP	WTP		%
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	Baik	0,72%
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	Informatif	100%
26. Level Maturitas SPIP	3	3	3,010	0,33%
27. Indeks Profesionalitas ASN	48,5	38,14	41,3	8,29%
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	70 %	67,10 %	69,08 %	2,95%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan desa Kondisi Mantap	63 %	29,79 %	30,21 %	1,41%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	81 %	56,73 %	57,57 %	1,48%
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	77,30 %	45,73 %	76,73 %	67,79%
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	77,66 %	72,28 %	73,83 %	2,14%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %	0 %	100 %	%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	50,15 %	3,78 %	63,85 %	1.589,15%
35. Resiko Konektivitas Kabupaten	66	69,20	69,00	-0,29%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Progres
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	77	82,38	82,66	0,34%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	72	83,50	82,26	-1,49%

Dari tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa terdapat 8 indikator dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2023, indikator tersebut adalah : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Nilai Realisasi Investasi, Persentase Usaha Mikro, Rasio Konektivitas Kabupaten, Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana.

2.2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Target Kinerja Indikator Sasaran ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya selama tahun berjalan, setiap tahunnya ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan target dalam RPJMD.



Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya			
	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	88		%
	3. Indeks Resiko Bencana	116,3	141,01	78,75%
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	80		%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan			
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,50%	2,14%	142,67%
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20%	9,68%	230,48%
	3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,98%	0,44%	7,36%
	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,58%		%
3	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri			
	1. Jumlah Desa Mandiri	67 desa	79 desa	117,91%
4	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka			
	1. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	39,12%	30,72%	78,53%
	2. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	20,82%	2,87%	13,78%
	3. Nilai Realisasi Investasi	620,20 Milyar	1.404,13 Milyar	226,40%
	4. Persentase Usaha Mikro	93,72%	99,93%	106,63%
	5. Persentase Koperasi Aktif	51,36%	46,49%	90,52%
4	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,05	80,15	106,80%
	2. Persentase RDTR	65,22%	4,35%	6,67%
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,04 tahun	12,20 tahun	93,56%
	2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,54 tahun	7,80 tahun	91,33%
	3. Angka Harapan Hidup	73,51 tahun	72,88 tahun	99,14%
	4. Pengeluaran Perkapita	7.963.000 Rp/ kapita/thn	8.055.000 Rp/ kapita/thn	101,16%
6	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			



No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
	1. Nilai SAKIP	A	B	84,45%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82,74	102,15%
	3. Opini BPK	WTP		%
	4. Predikat SPBE	Baik	Baik	92,67%
	5. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100%
	6. Level Maturitas SPIP	3	3,010	100,33%
	7. Indeks Profesionalitas ASN	50	41,3	85,15%
7	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			
	1. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	79%	69,08%	87,44%
	2. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	69%	30,21%	43,78%
	3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	87,03%	57,57%	66,15%
	4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	82,64%	76,73%	92,85%
	5. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	86,66%	73,83%	85,20%
	6. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	100%	100%
	7. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	69,05%	63,85%	92,47%
	8. Resiko Konektivitas Kabupaten	80,70	69,00	85,50%
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	85	82,66	97,25%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	80	82,26	102,83%

2.2.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Tabel. 3.5.
Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun Anggaran 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 718.894.568.234,00	Rp. 697.873.154.542,00	97,08
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 147.415.666.849,00	Rp. 142.921.298.239,67	96,95
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 63.788.000,00	Rp. 55.775.600,00	87,44
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 709.375.250,00	Rp. 700.455.775,00	98,74
5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 1.827.000,00	Rp. 0	0,00
6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 77.893.023.105,00	Rp. 70.521.062.835,29	90,54
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 26.146.530.000,00	Rp. 25.943.842.431,00	99,22
8 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 60.696.000,00	Rp. 58.115.232,00	95,75
9 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 2.356.479.000,00	Rp. 1.883.736.000,00	79,94
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 1.341.697.600,00	Rp. 1.340.967.610,00	99,95
11 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.800.379.000,00	Rp. 8.781.614.250,00	99,79
12 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.247.846.000,00	Rp. 5.175.331.450,00	98,62
13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.019.936.000,00	Rp. 1.019.936.000,00	100,00
14 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 58.162.986.378,00	Rp. 57.947.323.308,08	99,63
15 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 17.794.700.024,00	Rp. 17.753.811.392,82	99,77
16 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 118.993.444.620,00	Rp. 118.603.223.959,50	99,67
17 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 598.685.800,00	Rp. 578.094.000,00	96,56
18 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 664.096.000,00	Rp. 603.031.000,00	90,80
19 Program Pengembangan Perumahan	Rp. 402.479.000,00	Rp. 402.196.450,00	99,93
20 Program Kawasan Permukiman	Rp. 408.984.000,00	Rp. 408.364.400,00	99,85
21 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 163.422.300,00	Rp. 163.385.550,00	99,98
22 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.104.976.300,00	Rp. 1.087.542.500,00	98,42
23 Program Penanggulangan Bencana	Rp. 70.590.500,00	Rp. 70.529.000,00	99,91



	Program	Anggaran	Realisasi	%
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 737.710.000,00	Rp. 737.360.500,00	99,95
25	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 189.697.000,00	Rp. 189.605.998,00	99,95
26	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 450.000,00	Rp. 0,00	0,00
27	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 66.946.000,00	Rp. 65.767.235,00	98,24
28	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 4.030.060.500,00	Rp. 4.015.583.805,00	99,64
29	Program Penanganan Bencana	Rp. 84.748.000,00	Rp. 83.096.700,00	98,05
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 28.680.000,00	Rp. 28.680.000,00	100,00
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 42.988.900,00	Rp. 42.988.900,00	100,00
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 18.036.500,00	Rp. 18.036.500,00	100,00
33	Program Hubungan Industrial	Rp. 38.975.000,00	Rp. 38.975.000,00	100,00
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 8.479.000,00	Rp. 8.470.000,00	99,89
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 19.095.500,00	Rp. 18.741.200,00	98,14
36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 52.679.500,00	Rp. 50.954.700,00	96,73
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 174.260.000,00	Rp. 173.039.500,00	99,30
38	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 26.750.000,00	Rp. 26.678.875,00	99,73
39	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 28.990.000,00	Rp. 28.950.450,00	99,86
40	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp. 53.466.000,00	Rp. 53.279.900,00	99,65
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 205.175.700,00	Rp. 194.468.700,00	94,78
42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 40.946.800,00	Rp. 29.153.500,00	71,20
43	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp. 243.337.500,00	Rp. 241.570.150,00	99,27
44	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp. 80.926.000,00	Rp. 72.697.821,00	89,83
45	Program Penatagunaan Tanah	19.536.000,00	Rp. 18.262.400,00	93,48
46	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 991.457.100,00	Rp. 716.861.114,00	72,30
47	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.057.617.500,00	Rp. 834.533.510,00	78,91
48	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	Rp. 130.000.000,00	Rp. 129.723.050,00	99,79
49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 60.000.000,00	Rp. 59.813.100,00	99,69



	Program	Anggaran	Realisasi	%
50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 275.000.000,00	Rp. 90.670.450,00	32,97
51	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 60.000.000,00	Rp. 59.901.850,00	99,84
52	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.683.401.700,00	Rp. 1.683.111.648,00	99,98
53	Program Pencatatan Sipil	Rp. 345.660.000,00	Rp. 344.338.000,00	99,62
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 340.786.000,00	Rp. 340.627.800,00	99,95
55	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 77.000.000,00	Rp. 76.604.940,00	99,49
56	Program Penataan Desa	Rp. 39.504.000,00	Rp. 39.501.600,00	99,99
57	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 490.000.000,00	Rp. 479.158.000,00	97,79
58	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 62.644.000,00	Rp. 62.644.000,00	100,00
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 650.069.500,00	Rp. 649.865.500,00	99,97
60	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 3.005.384.500,00	Rp. 3.001.793.400,00	99,88
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 608.358.250,00	Rp. 513.837.525,00	84,46
62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 6.213.269.500,00	Rp. 4.398.972.700,00	70,80
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 3.400.216.000,00	Rp. 1.857.083.000,00	54,62
64	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.250.166.000,00	Rp. 1.246.756.489,00	99,73
65	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 954.787.450,00	Rp. 918.832.547,78	96,23
66	Program Aplikasi Informatika	Rp. 417.027.530,00	Rp. 406.820.925,00	97,55
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 195.863.676,00	Rp. 192.470.367,00	98,27
68	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp. 70.093.000,00	Rp. 69.789.000,00	99,57
69	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 29.907.000,00	Rp. 29.779.000,00	99,57
70	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 170.770.000,00	Rp. 170.559.000,00	99,88
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 359.600.000,00	Rp. 358.142.900,00	99,59
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 30.000.000,00	Rp. 29.756.605,00	99,19
73	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 34.125.000,00	Rp. 33.887.515,00	99,30
74	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 58.960.000,00	Rp. 58.823.300,00	99,77
75	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 454.075.000,00	Rp. 444.846.120,00	97,97
76	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 21.039.400,00	Rp. 21.010.300,00	99,86
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 3.214.506.000,00	Rp. 3.052.039.000,00	94,95
78	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 10.304.543.600,00	Rp. 9.649.545.393,00	93,64



	Program	Anggaran	Realisasi	%
79	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 45.069.272,00	Rp. 43.111.600,00	95,66
80	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.266.370,00	Rp. 29.855.000,00	98,64
81	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 5.584.175.400,00	Rp. 5.331.985.262,00	95,48
82	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 2.222.674.300,00	Rp. 1.972.929.160,00	88,76
83	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 650.582.800,00	Rp. 408.073.300,00	62,72
84	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 274.729.976,00	Rp. 274.350.858,00	99,86
85	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 111.163.000,00	Rp. 110.402.060,00	99,32
86	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 38.750.000,00	Rp. 38.338.100,00	98,94
87	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 891.829.200,00	Rp. 890.218.626,00	99,82
88	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.939.141.250,00	Rp. 1.814.070.039,00	93,55
89	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 39.281.300,00	Rp. 39.024.700,00	99,35
90	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 182.920.800,00	Rp. 182.139.375,00	99,57
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 584.100.000,00	Rp. 581.340.325,00	99,53
92	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 42.500.000,00	Rp. 41.916.100,00	98,63
93	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 661.688.000,00	Rp. 605.542.000,00	91,51
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 18.476.057.000,00	Rp. 18.134.542.273,00	98,15
95	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 291.684.000,00	Rp. 286.893.200,00	98,36
96	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 95.245.200,00	Rp. 92.061.500,00	96,66
97	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 206.709.800,00	Rp. 200.912.982,00	97,20
98	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 629.000.000,00	Rp. 566.229.940,00	90,02
99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 50.000.300,00	Rp. 49.998.550,00	100,00
100	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 70.000.000,00	Rp. 69.999.600,00	100,00
101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 104.499.600,00	Rp. 104.488.650,00	99,99
102	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.075.938.700,00	Rp. 1.071.921.171,00	99,63
103	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 227.339.600,00	Rp. 227.339.600,00	100,00
104	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 132.751.000,00	Rp. 132.735.750,00	99,99
105	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 57.643.058.172,00	Rp. 55.974.676.435,00	97,11
106	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 3.218.736.900,00	Rp. 3.156.870.860,01	98,08



	Program	Anggaran	Realisasi	%
107	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 11.367.540.200,00	Rp. 11.289.065.920,00	99,31
108	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.012.225.000,00	Rp. 1.007.136.950,00	99,50
109	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.792.450.000,00	Rp. 1.785.376.769,00	99,61
110	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 360.881.705.407,00	Rp. 359.271.577.860,00	99,55
111	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.331.744.639,00	Rp. 1.286.709.992,00	96,62
112	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.684.895.887,00	Rp. 1.573.253.717,00	93,37
113	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 3.040.664.390,00	Rp. 2.999.876.678,00	98,66
114	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.876.610.884,00	Rp. 1.866.794.398,00	99,48
115	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 15.254.160.000,00	Rp. 15.270.543.000,00	100,11
116	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 110.877.700,00	Rp. 110.260.700,00	99,44
117	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.642.747.000,00	Rp. 1.627.592.300,00	99,08
118	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.022.350.225,00	Rp. 1.007.898.925,00	98,59
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 121.555.000,00	Rp. 121.555.000,00	100,00
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.272.344.398,00	Rp. 3.256.011.118,00	99,50
121	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 103.500.000,00	Rp. 103.500.000,00	100,00
122	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 151.866.500,00	Rp. 136.816.500,00	90,09
123	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 960.993.830,00	Rp. 961.005.830,00	100,00
124	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 22.874.220.000,00	Rp. 22.874.220.000,00	100,00
125	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 58.580.000,00	Rp. 58.580.000,00	100,00
126	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 68.689.000,00	Rp. 68.689.000,00	100,00
127	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 263.915.000,00	Rp. 263.915.000,00	100,00
	Total	Rp. 1.755.977.469.566,00	Rp. 1.711.423.599.681,15	96,01

Realisasi anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 mencapai rata-rata 96,01% dengan kategori tinggi atau

teralisasi secara optimal. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2023 sebanyak 127 program guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

2.2.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Kapuas Hulu yang mengacu tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 terhadap indikator makro berjumlah 7 tujuan strategis dengan 10 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 33 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 masih terdapat beberapa data yang sifatnya sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik atau Lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

1. Evaluasi Tujuan Strategis

i) Tujuan Strategis mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya

Pada tujuan strategis mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya diukur dengan indikator tujuan Indeks Rasa Aman sampai dengan periode pelaporan belum diperoleh data. Namun dalam upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan religius, dilakukan dengan meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama.

ii) Tujuan Strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Pada tujuan strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

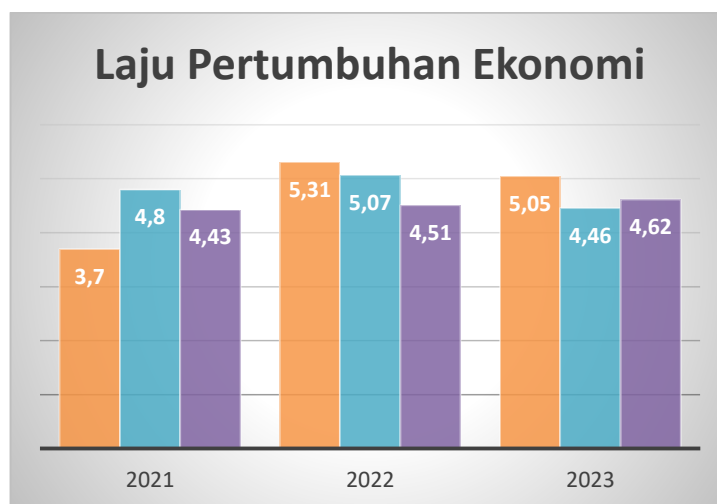
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,51	2	4,62	231	5	92,40
Rata-Rata Capaian Kinerja					231		92,40

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 4,62% dengan pencapaian terhadap target sebesar 231% (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan disbanding dengan target akhir RPJMD telah mencapai 92,40%. Capaian Kinerja tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan.



Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana ada beberapa sektor pendukung yang berkontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain : LPE sektor industri pengolahan, LPE sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



	2021	2022	2023
Nasional	3.7	5.31	5.05
Prov. Kalbar	4.8	5.07	4.46
Kab. Kapuas Hulu	4.43	4.51	4.62

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan klasifikasi capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah LPE Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Namun untuk pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

iii) Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri



Pada Tujuan Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dengan indicator persentase desa mandiri dengan hasil pencapaian indicator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa Mandiri	%	13,31	19,06	17,63	28,42	159,90	24,10	116,24
Rata-Rata Capaian Kinerja						159,90		116,24

Sumber: Kemendes

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya jumlah desa mandiri tahun 2023 sebesar 28,01% dengan pencapaian terhadap target sebesar 159,90 (sangat tinggi), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 116,24% dan melampaui target akhir RPJMD. Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Desa mandiri merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT pada tahun 2023 terdapat peningkatan status desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain, sebanyak 9 Desa Tertinggal telah mengalami peningkatan status menjadi Desa Berkembang, dan sebanyak 37 Desa Berkembang mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Jika dibandingkan dengan desa secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 278 desa

maka sampai dengan tahun 2023 mencapai 28,42% desa yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/ lingkungan yang berkelanjutan.

iv) Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Pada Tujuan Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka mempunyai dua indikator kinerja antara lain Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

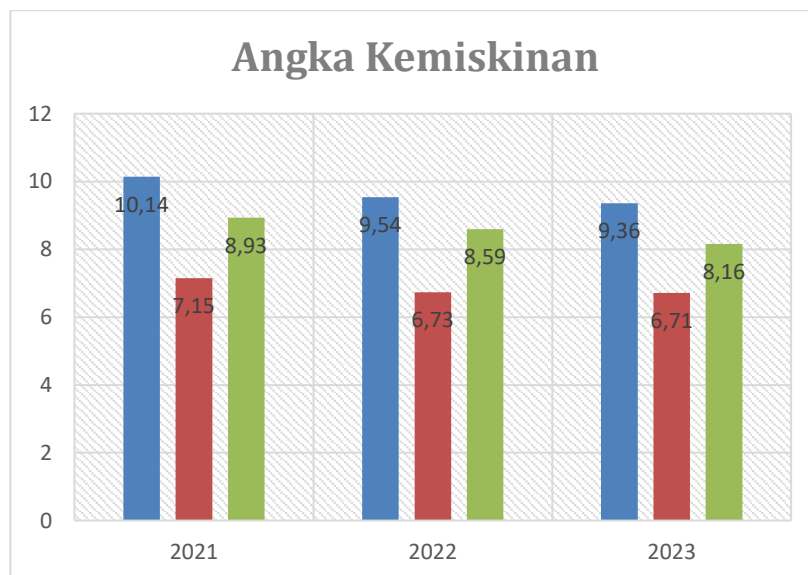
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Kemiskinan	%	8.93	8.59	7.83	8.16	95.79	7.08	84.75
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.18	2.21	3.51	2.19	137.61	3	127
Rata-Rata Capaian Kinerja						116.7		105.87

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi fokus yang diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 seperti yang terlihat dalam tabel diatas menunjukkan garis kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami

penurunan. Tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu berada pada level 8,93% dan tahun 2022 mengalami penurunan di level 8,59 dan pada tahun 2023 ditargetkan Kemiskinan turun pada level 7,83% namun realisasi Tingkat Kemiskinan tahun 2023 berada pada level 8,16% dengan hasil pencapaian 95,79% dari target tahun 2023.

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 ini linear dengan penurunan di level Provinsi dan Nasional. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah:



	2021	2022	2023
Nasional	10,14	9,54	9,36
Prov. Kalbar	7,15	6,73	6,71
Kab. Kapuas Hulu	8,93	8,59	8,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 di level 8,16%, masih berada diatas Provinsi Kalimantan Barat di level 6,71% namun berada dibawah



Nasional sebesar 9,36% sehingga Kabupaten Kapuas Hulu masuk sebagai *pilot project* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pada tahun 2022.

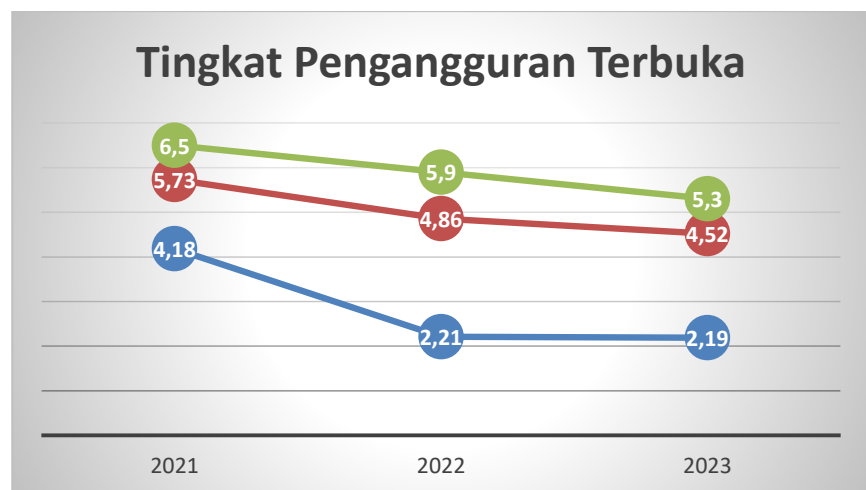
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Langkah-langkah strategi melalui refocusing belanja APBD tahun 2023 untuk diarahkan menanggulangi kemiskinan. Adapun strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan melalui tiga strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat yang sangat miskin seperti penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT serta PBI. Basis data yang digunakan dalam menetapkan sasaran kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE dan dilakukan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang terupdate setiap bulan, guna memastikan sasaran penerima bantuan sosial tepat sasaran. Strategi lainnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa peningkatan kapasitas masyarakat miskin seperti menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat miskin baik secara individu maupun yang tergabung dalam kelompok usaha kecil menengah kebawah. Selain itu strategi yang selanjutnya dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan pada lokasi prioritas melalui penyediaan pelayanan dasar seperti pelayanan Kesehatan, pelayanan Pendidikan dan peningkatan fasilitas penunjang infrastruktur yang memadai.

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada tabel diatas bahwa ada penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022, dimana tahun 2021 tingkat



pengangguran terbuka sebesar 4,18% sementara pada tahun 2022 turun pada level 2,21%. Sedangkan untuk capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 2,19%, dengan tingkat capaian dibanding dengan target sebesar 137,61%.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka linear dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Seperti terlihat pada tabel berikut:



	2021	2022	2023
Kab. Kapuas Hulu	4,18	2,21	2,19
Prov. Kalbar	5,73	4,86	4,52
Nasional	6,5	5,9	5,3

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Seperti terlihat pada tabel bahwa pencapaian kinerja pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 sebesar 2,19% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi Kalimantan Barat

sebesar 4,52%, sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tingkat Nasional sebesar 5,3%.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya strategis dalam rangka menurunkan angka pengangguran melalui beberapa kebijakan antara lain dengan meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja melalui pelatihan bagi pencari kerja dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas para pencari kerja. Selain itu juga dengan memberdayakan kualitas koperasi dan pelaku Usaha mikro agar lebih mandiri, produktif serta berdaya saing melalui pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Upaya strategis yang lain dalam mendorong produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Upaya meningkatkan peluang investasi daerah dengan berfokus pada peningkatan kemandirian pelaku usaha mikro.

v) Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Sumber: Kementerian LHK

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan predikat Baik dengan capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Beberapa upaya strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Meningkatkan komitmen dalam menjaga kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

vi) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Manusia		65,69	66,91	67,64	67,86	100,33	69,17	98,11
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,33		98,11

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2023 sebesar 67,86 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,33%, dimana target yang ditetapkan terlampaui, sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 kinerja telah mencapai 98,11%. Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun



2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

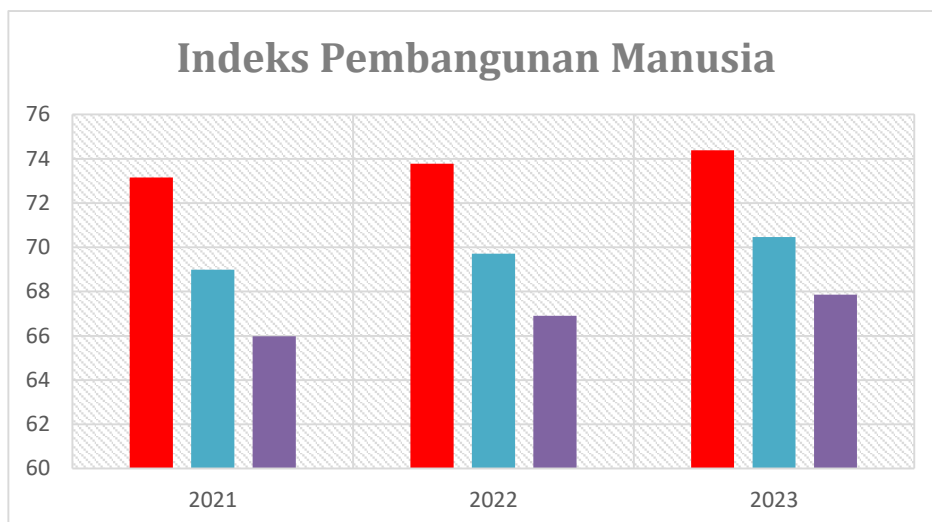
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam Upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu menurut
Dimensi Penyusunnya Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	72,1	72,4	72,5	72,5	72,7	72,9
Harapan Lama Sekolah	12	12	12,1	12,1	12,1	12,2
Rata-rata Lama Sekolah	7,25	7,47	7,52	7,5	7,6	7,8
Pengeluaran Perkapita	7,074	7,206	7,162	7,168	7,668	8,055

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, Kabupaten Kapuas Hulu masih berada dibawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut:



	2021	2022	2023
Nasional	73,16	73.77	74.39
Prov. Kalbar	68.99	69.71	70.47
Kab. Kapuas Hulu	65.98	66.91	67.86

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

IPM Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021-2023

vii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada Tujuan Strategis Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B	B	B	100	BB	84.45
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		84.45

Sumber: KemenpanRB

Pada tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatkan kualitas pelaksanaan



Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sebesar 100% sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 84,45%. Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2021 terus mengalami peningkatan, tetapi masih masuk kategori yang sama yaitu predikat B.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Pencapaian Refromasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tingkat pencapaian instansi pemerintah dalam menyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan MenpanRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang mana harus dilaksanakan juga pada level Mikro yaitu Instansi Pemerintah termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Perubahan Roadmap ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kapuas Hulu, dimana terdapat perubahan konsep penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang sangat signifikan yang menyebabkan Kabupaten Kapuas Hulu harus melakukan perubahan terhadap *Road Map* dan menyusun rencana aksi yang baru sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, sehingga capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 tidak dapat naik secara signifikan.



viii) Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pada Tujuan Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dengan hasil pencapaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	00	83.5	83.5	83.5	100	82.5	101.21
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		101.21

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 101,21%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Kesehatan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 83,5.

2. Evaluasi Sasaran Strategis

1. Sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Pada Sasaran Meningkatnya Kondusivitas wilayah dengan indikator indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kondusivitas wilayah pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, melalui beberapa tahapan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap Peraturan Daerah guna menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Toleransi Kesetaraan dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Pada sasaran strategis meningkatnya toleransi kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kerukunan antar umat beragama	Indeks	76	79,11	80	79,11	98,89	88	89,90
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,89		89,90

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya toleransi kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama pada tahun 2023 sebesar 98,89% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 89,90%. Data tersebut merupakan data sementara tahun lalu, realisasi tersebut sumber data dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan tahun 2022 Kementerian Agama melakukan survey terhadap kerukunan antar umat beragama di beberapa kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat. Untuk informasi secara spesifik indeks kerukunan umat beragama pada Kabupaten Kapuas Hulu tidak dilakukan survey, sehingga data yang bisa ditampilkan adalah data indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain dengan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang menunjang terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Sebagai rekomendasi terhadap pencapaian Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama tahun 2024 akan dilakukan survey secara mandiri kerjasama dengan Kementerian Agama terhadap Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana

Pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,23	138,7	124,06	141,01	86,34	116,3	78,75
Rata-Rata Capaian Kinerja						86,34		78,75

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana pada tahun 2023 sebesar 86,34% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 78,75%. Indeks Resiko Bencana dilakukan penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan input data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan secara periodik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023 sebesar 124,06. Dimana semakin tinggi capaian Indeks Resiko Bencana maka semakin tinggi juga resiko bencana yang terjadi di Kapuas Hulu. Jika dilihat dalam periode 2015-2022, skor Indeks Risiko Bencana mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pemenuhan salah satu indikator IKD yaitu adanya pembuatan draft Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan skor IRBI Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sosialisasi dan pendampingan serta

pelatihan kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Sebagai rekomendasi teknis bahwa mengingat Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang diterbitkan oleh BNPB berakhir pada tahun 2021 atau telah kadaluarsa masa berlakunya maka perlu menyusun dan menetapkan Kajian Resiko Bencana guna memenuhi salah satu komponen utama dalam indikator kapasitas penurunan indeks resiko bencana.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri

Pada sasaran strategis meningkatnya jumlah desa dengan IDM Kategori Mandiri dengan indicator Jumlah Desa Mandiri, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	53	49	79	161,22	67	117,91
Rata-Rata Capaian Kinerja						161,22		117,91

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah desa pada tahun 2023 sebesar 161,22% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 117,91%. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Harapannya



adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun capaian status kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan jumlah desa seluruhnya sebanyak 278 desa jika dibandingkan antara target sebanyak 49 desa dengan realisasi sebanyak 79 desa maka capaian desa yang memiliki status mandiri akhir tahun 2023 mencapai 161,22%. Rincian Status Kemandirian Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDTT pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 desa tertinggal telah mengalami peningkatan status menjadi desa berkembang, sehingga pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal, Sebanyak 37 desa berkembang mengalami peningkatan status desa menjadi desa maju dan desa mandiri, sebanyak 20 desa mengalami peningkatan menjadi desa maju dan 26 desa mengalami peningkatkan status menjadi desa mandiri.

Dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangan membangun desa dan desa membangun melakukan intervensi terhadap Indikator IDM yang masih kurang melalui program kegiatan pada OPD-OPD terkait, dan mendorong pihak swasta serta mendorong peran desa itu sendiri melalui kewenangan desa (desa membangun).

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat guna mendorong masyarakat desa dalam membangun desa. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa agar tercipta perangkat desa yang terampil, responsibilitas dan akuntabilitas, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa guna meminimalisir konflik antar desa. Peningkatan ekonomi masyarakat juga terus dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan kerjasama desa serta fasilitasi terhadap tim PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Pada sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan sosial dengan indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial, dengan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	33,28	36,92	30,72	83,21	39,12	78,53
Rata-Rata Capaian Kinerja						83,21		78,53

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan sosial pada tahun 2023 sebesar 83,21% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 78,53%.

Perkembangan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja persentase pelayanan kesejahteraan sosial adalah tersedianya sumber daya yang memadai, adanya kolaborasi lintas sektor non pemerintahan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, adanya regulasi daerah yang mendukung pencapaian pelayanan kesejahteraan sosial berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

6. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja

Pada sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator kinerja Persentase penempatan tenaga kerja terlatih, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase penempatan tenaga kerja terlatih	%	5,14	2,02	13,46	2,87	21,32	20,82	13,78
Rata-Rata Capaian Kinerja						21,32		13,78

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebesar 21,32% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 13,78%. Data pencari kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1 pada tahun 2021 sebanyak 366 orang dan tahun 2022 sebanyak 347 orang

. Apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan pada tahun 2023 sebanyak 20.344 orang. Sementara yang mendapatkan fasilitasi untuk pelatihan sebanyak 583 orang, sehingga hanya 2,87% tenaga kerja yang terlatih untuk siap di tempatkan. Kondisi ini tentu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, sehingga perlu Upaya yang lebih strategis agar semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan siap ditempatkan.

Sebagai upaya yang dapat dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak swasta yang menyediakan kesempatan kerja. Selain itu juga menyediakan akses peningkatan tenaga kerja yang produktif melalui pelatihan-pelatihan dengan jumlah yang lebih banyak dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

Pada sasaran strategis meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator nilai realisasi investasi, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai Realisasi Investasi	Milyar	546,57	2.974	569,18	1.404,13	246,69	620,2	226,40
Rata-Rata Capaian Kinerja						246,69		226,40

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya Investasi Daerah pada tahun 2023 sebesar 246,69% dibandingkan dengan target capaian

akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 226,40%. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjumlahan dari nilai investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan OSS RBA.

Bahwa selama kurun waktu 2020-2023 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2021-2026. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan realisasi investasi ini dipengaruhi oleh resesi dan inflasi yang dapat menghambat aliran modal. Selain itu kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di Daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).

Upaya yang telah dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yaitu dengan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan tertib dan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.



8. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indicator Nilai indeks kualitas lingkungan hidup, dengan hasil pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	74,17	78,07	74,64	80,15	107,38	75,05	106,80
Rata-Rata Capaian Kinerja						107,38		106,80

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 sebesar 107,38% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 106,80%. Berdasarkan data realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 80,15 dengan kategori Baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati adalah 74,64, dengan capaian 107,38%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 58,89 (sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 94,76 (Sangat baik) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) dengan bobot 89,63 (baik). Berdasarkan Capaian Kinerja pada IKA, IKU dan IKL tahun 2023 tersebut, diperoleh IKLH Kabupaten tahun 2023 sebesar 80,15 atau kategori Baik. Nilai ini telah memenuhi target pada tahun



2023 bahkan melebihi target tahun 2023 dan juga melebihi target akhir RPJMD tahun 2026.

9. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Pada sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan indikator kinerja Persentase RDTR, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase RDTR	%	4,35	4,35	26,09	4,35	16,67	65,22	6,67
Rata-Rata Capaian Kinerja						16,67		6,67

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2023 sebesar 16,67% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 6,67%. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- Rencana RDTR perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 23 kota Kecamatan;
- Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 26,09% untuk 3 Kecamatan antara lain : RDTR Kota Badau, RDTR Kota Putussibau Utara, RDTR Kota Putussibau Selatan;
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berhasil ditetapkan adalah RDTR Kota Badau (4,35%), sedangkan untuk dua kota yang menjadi target yaitu Putussibau Utara dan Putussibau Selatan masih dalam proses pemenuhan syarat substansi yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

Beberapa langkah strategis yang dapat diupayakan dalam penetapan RDTR kota Putusibau utara dan Putussibau Selatan dengan melakukan koordinasi intens dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terhadap perkembangan proses pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sehingga bisa didorong untuk dapat segera di selesaikan.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Pada sasaran strategis meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harapan Lama sekolah	Tahun	12,05	12,14	12,66	12,2	96,37	13,04	93,56
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,52	7,59	8,07	7,8	96,65	8,54	91,33
Rata-Rata Capaian Kinerja						96,51		92,44

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 95,51% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 92,44%. Hal ini bisa diartikan bahwa target Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2023 sudah tercapai . Peningkatan ini tidak lepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya Pendidikan. Selain itu melalui program beasiswa dan biaya operasional sekolah (BOS)

dan program pemerintah lainnya mampu berkontribusi dalam mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua siswa. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kapuas telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan melalui capaian indikator Kinerja Utama Bupati Kapuas Hulu.

11. Sasaran strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat

Pada sasaran strategis meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,69	73,02	72,88	99,81	73,51	99,14
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,81		99,14

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya angka harapan hidup masyarakat pada tahun 2023 sebesar 99,81% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 99,14%. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 sebesar 72,88 tahun dan tahun 2022 sebesar 72,69. Ada kenaikan disbanding dengan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Pembangunan sektor Kesehatan. Namun apabila dibandingkan dengan target masih dibawah target tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target pada RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain factor Kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan dalam

memberikan akses pelayanan Kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Puskesmas yang tersebar diseluruh Kecamatan, maka harapannya masyarakat dapat mengakses fasilitas Kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Kondisi wilayah yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam memberikan akses Kesehatan bagi masyarakat, namun upaya yang solutif akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan dengan membentuk Puskesmas Pembantu.

12. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan Indikator Nilai SAKIP, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai SAKIP	Predikat	B	B	BB	B	95,51	A	84,45
Rata-Rata Capaian Kinerja						95,51		84,45

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2023 sebesar 95,51% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 84,45%.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan penyelenggaraan visi,

misi, tujuan dan sasaran Kepala daerah yang ditetapkan melalui Sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami peningkatan score atau angka sejak tahun 2019 sampe dengan 2022. Namun dengan terbitnya PermenpanRB no 88 Tahun 2022 tentang pedoman evaluasi AKIP, menyebabkan Nilai AKIP instansi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan dimana tahun 2022 dengan angka (68,60) B dan Tahun 2023 di angka (67,57) B, termasuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Kendala Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan AKIP adalah tidak adanya pembinaan yang dilakukan baik itu dari KemenpanRB maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kurang optimal. Beberapa hal penting dalam menyelenggarakan AKIP, bahwa tidak terdapat reward dan punishment yang diberikan kepada instansi yang menyelenggarakan AKIP, hal ini menyebabkan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKIP.

13. Sasaran Kinerja Optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Pada Sasaran Kinerja Optimalnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Optimalnya pengelolaan keuangan

daerah pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%.

Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan efektivitas system pengendalian intern.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2021 hingga 2023 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bererti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Diharapkan kedepannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga memperoleh hasil WTP dengan kualitas sangat baik.

14. Sasaran Kinerja Optimalnya Predikat pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

Pada Sasaran Kinerja Optimalnya Predikat pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu dengan Indikator Predikat SPBE, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Predikat SPBE	Predikat	Baik	Baik	baik	Baik	102,96	Baik	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						102,96		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Optimalnya Predikat pelaksanaan SPBE



Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 sebesar 102,96 % dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada PermenpanRB Nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semula penghitungan SPBE berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan SPBE dalam mendukung smart city antara lain, membentuk tim pengarah SPBE, melakukan harmonisasi SPBE Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu dengan membuat rancangan arsitektur SPBE, serta dalam rangka Pembangunan basis data dan penguatan pengelolaan statistic, Kabupaten Kapuas Hulu telah mengembangkan portal satu data Kabupaten Kapuas Hulu guna mendukung satu data Indonesia.

15. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan kabupaten dengan indicator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	64	67,1	70	69,08	98,69	79	87,44
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,69		87,44

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap pada tahun 2023 sebesar 98,69% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 87,44%. Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap sebesar 69,08%, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 67,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

16. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan pada status ruas jalan desa dengan indicator Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	%	59	29,79	63	30,21	47,95	69	43,78
Rata-Rata Capaian Kinerja						47,95		43,78

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap pada tahun 2023 sebesar 47,95% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 43,78%. Data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap sebesar 30,21 %, meningkat disbanding dengan tahun 2022 sebesar 29,79 %. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan Desa antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan Desa dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja salah satunya adalah adanya perbedaan data awal yang di jadikan dasar penetapan target 2022, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan survey ulang terhadap kondis jalan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR dan diperoleh hasil kondisi jalan Desa yang sangat jauh dari target tahun 2023 sehingga sebagai rekomendasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja untuk tahun selanjutnya.

17. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten



Pada sasaran strategis meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100		100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%

Berdasarkan data realisasi indicator sasaran Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten sebesar 100% dan target tahun 2023 sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa tahun 2023 terdapat 15 unit rumah korban bencana kabupaten dan telah dilakukan rehabilitasi terhadap 15 unit rumah tersebut. Data Bencana Kabupaten menjadi dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban Bencana.

18. Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani

Pada sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani, hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	%	37,55	37,78	50,15	63,85	127,32	69,05	92,47
Rata-Rata Capaian Kinerja						127,32		92,47

Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani pada tahun 2023 sebesar 127,32% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 92,47%

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).

Berdasarkan data Kawasan kumuh Kabupaten Kapuas Hulu terdapat luas Kawasan kumuh Kabupaten sebesar 359,46 yang tersebar di beberapa Kawasan desa. Untuk Persentase rata-rata kekumuhan sektoral sesuai dengan SK Bupati sebesar 42,02 dan persentase kontribusi penanganan tahun 2023 sebesar 127,32% dengan persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 63,85% atau seluas 229,53 Ha.

Kontribusi penanganan tahun 2023 melampaui target yang direncanakan tahun 2023 sebesar 50,15%. Hal-hal kendala permasalahan dalam penanganan antara lain dikarenakan keterbatasan Sumber daya. Sebagai rekomendasi terhadap upaya pencapaian target tahun selanjutnya antara lain dengan melakukan koordinasi lebih intens dengan stakeholder dan lintas sector, sehingga terdapat kolaborasi dan bersinergi dalam menangani Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu.

19. Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Pada sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah kabupaten dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, dengan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Akhir RPJMD (2026)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	69,21	66	69	104,55	80,7	85,50
Rata-Rata Capaian Kinerja						104,55		85,50



Berdasarkan tabel diatas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2023 sebesar 104,55% dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85,50%. Data realisasi indikator sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten sebesar 69% dan target tahun 2023 sebesar 66% dengan capaian sebesar 104,55%. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi ketersediaan trayek angkutan jalan dan lintas penyeberangan. Untuk trayek angkutan jalan yang tersedia masih belum terpenuhi secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan, namun untuk Lintas penyeberangan sudah dapat terpenuhi/ terlayani sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan terselenggaranya fasilitasi layanan trayek, khususnya pada lintas penyeberangan, telah dilakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta yang menjadi mitra dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Sebagai rekomendasi kedepan, akan dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengupayakan pemenuhan dan pelayanan trayek angkutan jalan yang belum tersedia.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah/kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapatkan Tugas Pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berupa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023. DAK tersebut digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 253.417.908.000 untuk DAK Fisik dan terealisasi sebesar 250.755.471.580 atau sebesar 98,95 % .

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 %
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
		yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100

4.1.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	6.403	68,226%
			jumlah penduduk usia 5-6 tahun Kabupaten /Kota	9.385	
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	27.222	92,503%
			jumlah penduduk usia 7-12 tahun Kabupaten /Kota	29.428	
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	732	1,429%
			jumlah penduduk usia 7-18 tahun Kabupaten /Kota	51.230	

Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2023 Capaian Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 68,229 % meningkat sebesar 19,332 % dibanding capaian pada tahun 2022 sebesar 48.897%. Target 100 persen belum bisa dicapai ini disebabkan karena data anak usia dini yang sudah tamat dan sedang belajar pada PAUD yang diselenggarakan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Pada tahun 2023 Capaian Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebesar 92,503 % meningkat sebesar 7,708 % dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 84,795%. Peningkatan ini disebabkan sudah mulai meningkat kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.
- c. Pada tahun 2023 Capaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebesar 1,429 meningkat sebesar 0,275 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 1.152%. Kesadaran pentingnya pendidikan kesetaraan harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa yang merupakan ujung tombak keberhasilan program ini.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Untuk mendukung upaya pemenuhan SPM, pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.3.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	147.603.225.769,00	86.233.287.405,20	58,42
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	17.127.134.500,00	16.065.590.518,00	93,80
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.774.236.500,00	2.683.306.253,00	96,72
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	475.080.750,00	418.054.539,00	88,00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.066.768.850,00	992.842.067,00	93,07
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.702.532.800,00	4.621.763.475,00	98,28
6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.519.543.200,00	2.230.357.158,00	88,52
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.257.205.000,00	10.882.297.800,00	96,67
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	264.447.500,00	248.898.750,00	94,12
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	306.712.500,00	303.122.100,00	98,83
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	862.572.500,00	831.244.050,00	96,37
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.502.972.500,00	1.495.374.200,00	99,49
12	Pengadaan Mebel Sekolah	907.502.500,00	903.998.000	99,61
13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.994.872.500,00	2.989.538.450,00	99,82
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	491.720.000,00	98,34
15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.193.175.900,00	1.102.722.023,00	92,42
16	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	364.919.700,00	273.428.570,00	74,93
17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	437.454.000,00	362.634.200,00	82,90
18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.601.915.960,00	6.446.302.600,00	97,64
19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.592.523.000,00	1.292.464.223,20	81,16
20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.609.870.679,00	35.555.819.473,67	99,85
21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.544.500,00	104.035.500,00	99,51
22	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.688.072.500,00	1.668.107.100,00	98,82
23	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.185.463.100,00	1.172.222.949,00	98,88
24	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	329.119.200,00	325.359.251,00	98,86
25	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.582.357.050,00	1.404.044.682,00	88,73
26	Pembangunan Laboratorium	4.233.972.300,00	4.188.612.288,00	98,93
27	Pembangunan Asrama Sekolah	412.762.500,00	408.392.600,00	98,94
28	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.333.997.350,00	1.268.303.423,00	95,08
29	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.801.459.100,00	2.748.620.430,00	98,11
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.994.782.500,00	3.864.781.778,00	96,75



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	547.847.500,00	545.152.300,00	99,51
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	266.322.500,00	248.871.300,00	93,45
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	962.577.500,00	954.451.500,00	99,16
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	207.962.500,00	205.074.200,00	98,61
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	511.097.500,00	507.986.600,00	99,39
36	Pengadaan Mebel Sekolah	112.322.500,00	109.448.000,00	97,44
37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.113.172.500,00	1.110.965.900,00	99,80
39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	177.354.000,00	108.018.600,00	60,91
40	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	437.454.000,00	362.634.200,00	82,90
41	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	127.091.000,00	76.555.400,00	60,24
42	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.575.000.500,00	1.494.011.500,00	94,86
43	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.475.441.720,00	4.268.501.890,00	95,38
44	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	337.081.500,00	265.279.250,00	99,67
45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	388.199.800,00	329.723.850,00	84,94

4.1.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Data Personil SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	GURU	
	a. TK/PAUD	51 orang
	b. SD	1748 orang
	c. SMP	705 orang
2	KESETARAAN	100 orang
3	PENGAWAS	38 orang
4	PENILIK	orang
5	TENAGA KEPENDIDIKAN/PENUNJANG	573 orang
6	PEJABAT STRUKTURAL	9 orang
7	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	45 orang
8	JABATAN FUNGSIONAL	7 orang



JUMLAH	3276 orang
--------	------------

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas dan memiliki 23 Kecamatan.
- b. Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- c. Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- d. Sumber daya aparatur terbatas.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya dana dan SDM.
- b. Meningkatkan sarana infrastruktur.
- c. Program berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- d. Sistem rekrutmen pegawai khususnya guru/pendidik minimal pendidikan S-1/ D-4.
- e. Penguatan sistem pengendalian, pengawasan di satuan pendidikan melalui petugas pengawas / penilik.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang

Kesehatan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang kesehatan terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan balita,
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Target dan Indikator SPM Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%



NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

4.2.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 4.6.
Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun	3.160	60,992%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kab.kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	5,181	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jml Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kab./ kota dlm kurun waktu satu tahun	3.564	72,058%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.946	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar dlm kurun waktu satu tahun	3.800	80,679%
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	4.710	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 0-5 bulan yg mendapat-kan pelayanan kese-hatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	14.705	64,905%
			Jumlah orang usia 0-5 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	22.658	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelaya-nan kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun ajaran	39.593	97,182%
			Jumlah orang usia 7-15 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yg sama	40,471	



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	179.694	97,957%
			Jumlah orang usia 15-59 th yg ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	183.441	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal satu kali di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	20.630	80,623%
			Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang ada di wil. kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	25.588	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu tahun	61.274	81,427%
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang berada di dlm wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/ kota dalam waktu satu tahun yang sama	75.250	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.365	100%
			Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.365	



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	583	100 %
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama	583	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penun-jang dalam kurun waktu satu tahun	4.687	100 %
			Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.687	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	6.722	100%
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	6.722	

- a. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sebesar 60,992%, tidak optimalnya capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu hamil ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu hamil pada tahun 2023.
- b. Capaian pelayanan kesehatan Ibu Bersalin adalah sebesar 72,058%, tidak optimalnya capaian ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu bersalin ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan



menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu bersalin pada tahun 2023.

- c. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebesar 80,679%. Hal ini disebabkan karena sasaran bayi baru lahir ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, mendekati data riil jumlah bayi baru lahir tahun 2023.
- d. Capaian pelayanan kesehatan balita adalah sebesar 64,905%, tidak optimalnya pelayanan kesehatan balita disebabkan karena sebagian besar balita tidak datang lagi ke posyandu/fasilitas kesehatan setelah berusia 12 bulan
- e. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 97,182% pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi disebabkan mulai aktifnya kembali proses belajar mengajar bagi anak-anak usia sekolah.
- f. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah sebesar 97,957%, disebabkan meningkatnya kesadaran penduduk usia produktif melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan dan sasaran penduduk usia produktif ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.
- g. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 80,623%, sasaran penduduk usia lanjut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.
- h. Capaian pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah sebesar 81,427%, tidak optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini disebabkan karena sasaran penderita hipertensi ini ditetapkan berdasarkan angka prevalensi yang diperoleh dari hasil riset kesehatan

dasar (riskesdas) tahun sebelumnya, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil penderita hipertensi pada tahun 2023.

- i. Capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) adalah sebesar 100%, ini berarti seluruh penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah sebesar 100%, hampir semua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- k. Capaian pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC) adalah sebesar 100%, semua orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- l. Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah sebesar 100%, hal ini karena tidak seluruh orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat ditemukan dan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Kesehatan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.7.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Kesehatan

NO	Variabel SPM	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Rp 3.269.632.000	Rp 2.802.160.000	85,7%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin, Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp 311.421.000	Rp 310.726.621	99,8%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir, Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar			
4	Pelayanan Kesehatan balita, Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar+jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita 36-59 bulan	Rp 270.255.000	Rp 187.699.000	69,5%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp 1.139.326.000	Rp 1.006.492.000	88,3%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Rp 1.139.326.000	Rp 1.006.492.000	88,3%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Rp 763.942.000	Rp 676.606.000	88,6%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Jumlah penderita usia >= 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp 93.620.000	Rp 92.540.000	98,8%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM), Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp 756.868.000	Rp 755.381.561	99,8%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat, Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Rp 441.690.000	Rp 411.341.000	93,1%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Rp 968.226.000	Rp 401.319.000	41,4%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh, (HIV), jumlah orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Rp 321.010.000	Rp 291.553.000	90,8%
	TOTAL	Rp 9.475.316.000	Rp 7.942.310.182	83,8%

4.2.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8.

Data Personil SPM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	PPPK	JUMLAH
1	DOKTER UMUM	30	14	10	1	4	59
2	DOKTER GIGI	6	1	7	0	1	15
3	DOKTER SPESIALIS	6	5	0	0	0	11
4	PERAWAT	289	313	4	115	72	793
5	PERAWAT GIGI	29	7		6	1	43
6	BIDAN	234	148	5	66	54	507
7	ANALIS	32	16	8	6	4	66
8	FARMASI	28	9	5	7	0	49
9	APOTEKER	18	1	2	0	4	25
10	KESLING	19	4	5	0	2	30
11	SKM	29	31	2	7	9	78
12	FISIOTERAPI	4	2	0	0	0	6
13	ELEKTROMEDIK	1	1	0	0	0	2
14	RADIOGRAFER	4	4	0	0	0	8
15	GIZI	34	6	7	6	4	57
16	REKAM MEDIK	1	13	0	3	3	20
17	TENAGA PENUNJANG	106	190	0	12	2	310
JUMLAH							2079

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara data proyeksi dan data riil yang besar.
2. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
3. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
4. Pencatatan dan laporan yang belum tertib.



5. Perekrutan SDM belum menyesuaikan kebutuhan terkait Kompetensi Peningkatan SPM.
6. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.
7. Evaluasi SPM belum terintegrasi secara optimal.
8. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna. dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
9. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
10. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
11. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re- emerging).
12. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih tidak optimal di masyarakat.
13. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
16. Masyarakat yang takut mendatangi atau mengunjungi Fasilitas kesehatan sehingga terjadi keterlambatan penanganan komplikasi pada ibu maupun bayi.
17. Penjangkaran dan pelayanan kesehatan tidak bias dilaksanakan secara optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
- b. Peningkatan dan Pemerataan SDM, diutamakan untuk



ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan.

- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan masyarakat, dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
- d. Efisiensi pembiayaan, Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien.
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan, diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- f. Penguatan pelayanan kesehatan sekunder (rujukan).
- g. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*), melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
- h. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan, melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil.
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat.

- j. Peningkatan Inovasi dalam pelayanan.
- k. Penjaringan dan pelayanan di masa pandemi berpedoman pada protokol kesehatan serta petunjuk teknis yang berlaku.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang Pekerjaan umum terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	100 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %

4.3.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten	50.107	57,566%
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	87.042	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air limbah domestik di dlm sebuah kab.	41.922	76,728%
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	54.637	

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	Penyusunan Rencana , Kebijakan, Staategi dan Teknis SPAM	118.950.000,00	114.645.000,00	96,38%
2	Supervisi pembangunan/Peningkatan /perluasan/Perbaikan SPAM	10.000.000,00	9.973.350,00	99,73%
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	867.335.000,00	860.700.000,00	99,24%
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	261.300.000,00	261.071.900,00	99,91%
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Des dan kelompok Masyarakat	32.700.000,00	25.490.000,00	77,95%
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaa di Kawasan Perdesaan	7.510.094.000,00	7.509.734.000,00	100,00%
7	Penyusunan Rencana , Kebijakan, Staategi dan Teknis SPAM	5.108.508.333,33	5.105.839.060,00	99,95%
JUMLAH TOTAL		13.908.887.333,33	13.887.453.310,00	99,846%

4.3.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut nama jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Data Personil SPM Pekerjaan Umum

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
3.	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan	1
4.	Kepala Bidang Bina Marga	1
5.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
7.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	1
8.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	1
9.	Kepala Subbagian Program	1
10.	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur	1
10.	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I	2
9.	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan	1
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	22
11.	Jabatan Fungsional Umum	32
JUMLAH		67

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang menggunakan perpipaan serta Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih yang ada bahkan Sering diabaikan pentingnya peran kebersihan
- Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan Adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- Adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas terkait pemeliharaan saran dan prasarana air bersih.

- b. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari terkait pemeliharaan saran dan prasarana sanitasi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa SPM bidang perumahan rakyat terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah rumah korban bencana yg di tangani sesuai standar di wil. kerja Kab./Kota dlm kurun waktu 1 tahun	15	100 %
			Jumlah total rencana rumah korban yang akan ditangani di wil. kerja dlm Kab./Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah total rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan	0	0%
			rumah tangga penerima subsidi uang sewa	0	
			rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	

Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebesar 0 %, Capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat warga masyarakat yang harus direlokasi sebagai akibat adanya program pemerintah yang harus dilakukan di lokasi pemukiman, sehingga capaian target kinerja layanan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat dipenuhi.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.17.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PENEMBANGAN PERUMAHAN			
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabuapten/Kota	121.459.000,00	121.302.700,00	99,87%
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	281.020.000,00	280.893.750,00	99,96%
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	138.950.000,00	138.815.300,00	99,90%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	151.907.000,00	151.714.600,00	99,87%
3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00%
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	116.457.000,00	116.164.500,00	99,75%
III	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	163.422.300,00	163.385.550,00	99,98%
	JUMLAH TOTAL	974.885.300,00	973.946.400,00	99,90%

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.18.

Data Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3
4.	Pelaksana	13
	JUMLAH	18

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- Capaian SPM Bidang Perumahan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kemampuan

anggaran yang terbatas dibandingkan dengan pemenuhan capaian SPMnya, disamping itu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan konsekuensi relokasi warga, mengingat lahan yang masih cukup luas untuk kegiatan pembangunan.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari APBD khususnya APBN;
- b. Perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota;

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- e. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.19.
Target dan Indikator SPM
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

4.5.3. Realisasi Capaian SPM



4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	2,86%
			Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada	35	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	271.584	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya mendapatkan layanan informasi rawan bencana	271.584	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.268	0.466%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	271.584	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	31.869	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	31.869	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	29	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam 1 (satu) tahun	29	

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Capaian layanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 0%, hal ini karena pada proses penertiban dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), dilakukan pendekatan persuasif dan komunikatif terlebih dahulu kepada warga yang rawan terkena dampak sehingga bisa mengurangi kerugian baik secara riil dan materiil dari tindakan penegakan perda tersebut dengan demikian bersarkan hasil mufakat yang baik antara warga maupun anggota yang bertugas di lapangan bisa saling terjaga keharmonisan, keamanan dan ketertiban secara hukum dari penegakan perda dan sebaliknya dari hal-hal yang merugikan warga.

Untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2023 hanya dapat dicapai sebesar 0,466 % dikarenakan beberapa hal diantaranya keadaan geografis kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan daerah banjir

menyebabkan bagi warga Kapuas Hulu banjir bukan dianggap bencana, tidak semua warga terdampak banjir, dan anggaran untuk kegiatan pencapaian target dianggap kurang memadai.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.21.

**Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Pencegahan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	620.316.800,00	614.884.900,00	99,12%
2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pjerkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	74.306.500,00	71.335.700,00	96,00%
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sreta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.958.600,00	5.958.600,00	100,00%
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	202.391.400,00	200.666.800,00	99,15%
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	108.302.800,00	104.394.800,00	96,39%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3.187.500,00	1.500.000,00	47,06%
7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	4.354.000,00		0,00%
8	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	37.683.700,00	3.666.500,00	9,73%
9	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	48.475.000,00	48.111.200,00	99,25%
	Sub Jumlah	1.104.976.300,00	1.050.518.500,00	95,07%
II	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA			
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.495.000,00	12.488.000,00	99,94%
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota	16.500.000,00	16.494.000,00	99,96%
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	41.595.500,00	41.547.000,00	99,88%
	sub total II	70.590.500,00	70.529.000,00	99,91%
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupten/kota	66.695.000,00	66.665.000,00	99,96%
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabuapten/kota	512.451.000,00	512.414.900,00	99,99%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri	70.000.000,00	69.896.700,00	99,85%
4	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan penyelematan Non Kebakaran	88.564.000,00	88.383.900,00	99,80%
	sub total III	737.710.000,00	737.360.500,00	99,95%
	JUMLAH TOTAL	1.913.276.800,00	1.858.408.000,00	97,13%

4.5.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan dalam jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.22.
Data Personil SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
5.	Kepala Bidang Penegakan Operasi	1
6.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	1
7.	Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan	1
8.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	1
9.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
10.	Jabatan Fungsional	27
11.	Jabatan Pelaksana	12
12.	Tenaga Kontrak Pol PP	54
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
13.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
14.	Kepala Sub Bag. Umum dan Aparatur	1
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
16.	Jabatan Fungsional Umum	17
17.	Jabatan fungsional tertentu	5
18.	Tenaga kontrak BPBD	18
JUMLAH		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.



- d. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- e. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
- f. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
- g. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
- i. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- c. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.



- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
- f. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa SPM bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, serta
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.23.

Target dan Indikator SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100%

4.6.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.24.

Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah WN penyandang disabilitas yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	652	57,699%
			Jumlah WN penyandang disabilitas skala Kab. dalam 1 tahun yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi di luar panti	1.130	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Jumlah anak terlantar yg memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah anak terlantar skala Kab. dalam 1 tahun yang seharusnya mendapatkan layanan sosial diluar panti	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah lanjut usia terlantar yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 tahun	0	
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah gelandangan dan dan pengemis yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	133	0,147%
			Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	31.869	

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa pelayanan dasar di bidang urusan sosial yaitu :

1. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti belum sesuai target yang telah di tentukan, hal ini karena tidak terdapat penyandang disabilitas terlantar di kabupaten kapuas Hulu
2. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti dan pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tidak terdapatnya anak terlantar, gelandangan ataupun pengemis di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pelayanan dasar untuk Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti tidak sesuai target dikarenakan tidak ada lanjut usia terlantar di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pelayanan dasar untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana sudah mencapai sesuai target 0,147%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Sosial sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.25

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten./Kota	23.200.000,00	23.200.000,00	100,00%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabuapten/Kota	166.497.000,00	166.405.998,00	99,95%
	SUB JUMLAH	189.697.000,00	189.605.998,00	99,95%
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	450.000,00	450.000,00	100,00%
	SUB JUMLAH	450.000,00	450.000,00	100,00%
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	Penyediaan Permakanan	220.000,00	220.000,00	100,00%
2	Pemberian Layanan Rujukan	66.726.000,00	66.726.000,00	100,00%
	SUB JUMLAH	66.946.000,00	66.946.000,00	100,00%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.954.557.500,00	3.941.145.328,00	99,66%
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.503.000,00	74.438.477,00	98,59%
	SUB JUMLAH	4.030.060.500,00	4.015.583.805,00	99,64%
v	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	Penyediaan Makanan	19.548.000,00	19.176.700,00	98,10%
2	koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	65.200.000,00	63.920.000,00	98,04%
	SUB JUMLAH	84.748.000,00	83.096.700,00	98,05%

4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26.
Data Personil SPM Bidang Sosial

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1
2.	Kepala Bidang Sosial	1

3.	Fungsional tertentu	2
4.	Fungsional Umum	5
JUMLAH		9

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Tidak ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS, TSKS, PKH dan Organisasi Sosial Lainnya untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.



4. Memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan kurang mampu Di luar panti.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi



3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan dan keuangan, manajemen keuangan, pengadaan, kepegawaian serta transparansi publik.

Selain memuat capaian kinerja urusan pemerintahan sebagaimana disampaikan diatas, LPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menggambarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi SPM 6 (enam) bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Sosial serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan Pemerintahan masih bertahap bangkit kembali dengan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya masing-masing, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun



2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai pada tahun 2023 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun sebelumnya mengingat masih terdapat kinerja yang belum memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan keterbatasan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2021-2026. Capaian kinerja IKU pada tahun 2021 akan menjadi umpan balik dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga RPJMD yang akan disusun nantinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan pada akhirnya akan dapat menunjang peningkatan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Capaian kinerja yang masih rendah pada Indikator Kinerja Keluaran (Output), Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan karena masih terdapat kekurangan, kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022. Terhadap hal tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun mendatang



untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT).

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6	6.403	x 100	68,226%
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	9.385		
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	27.222	x 100	92,504%
			jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	29.428		
		3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	14.109	x 100	94,533%
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	14.925		
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	732	x 100	1,429%
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	51.230		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk kabupaten}} \times 100$	$\frac{341 \times 1000}{271.584} \times 100 = 125,560\%$	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3}{3} \times 100 = 100,000\%$		
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3.160}{5.181} \times 100 = 60,992\%$		
		4 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar}}{\text{Jumlah Ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3.564}{4.946} \times 100 = 72,058\%$		
		5 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah bayi baru lahir di kabupaten}} \times 100$	$\frac{3.800}{4.710} \times 100 = 80,679\%$		
		6 Cakupan Pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah balita di kabupaten}} \times 100$	$\frac{14.703}{22.653} \times 100 = 64,905\%$		
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}} \times 100$	$\frac{39.593}{40.741} \times 100 = 97,182\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		8 Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}} \times 100$	$\frac{179.694}{183.441} \times 100 = 97,957\%$		
		9 Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah warga negara usai 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah orang warga negara 60 tahun ke atas di kabupaten}} \times 100$	$\frac{20.630}{25.588} \times 100 = 80,624\%$		
		10 Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita hipertensi di kabupaten}} \times 100$	$\frac{61.274}{75.250} \times 100 = 81,427\%$		
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3.365}{3.365} \times 100 = 100,000\%$		
		12 persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten}} \times 100$	$\frac{583}{583} \times 100 = 100,000\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		13 Persentase orang terduga TBc mendapatkan pelayanan TBc sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita TBc yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBc di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{4.687}{4.687} \times 100 = 100,000\%$		
		14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{6.722}{6.722} \times 100 = 100,000\%$		
		1 Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)}}{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0,000\%$		
		2 Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100$	$\frac{5,95}{45,31} \times 100 = 13,132\%$		
3	Pekerjaan Umum				Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		3 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100$	$\frac{4552,00}{6166,00} \times 100 = 73,824\%$		
		4 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten}} \times 100$	$\frac{50107,00}{87042,00} \times 100 = 57,566\%$		
		5 Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{41922,00}{54637,00} \times 100 = 76,728\%$		
		6 Rasio Kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100$	$\frac{5788,00}{5788,00} \times 100 = 100,000\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang mantap}}{\text{Jumlah Panjang jalan Keseluruhan di Wilayah Kabupaten}} \times 100$	$\frac{753,06 \times 100}{1106,15} = 68,080\%$		
		8 Rasio tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator teknis/analisis}}{\text{jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten}} \times 100$	0,000%		
		9 Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyeksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100$	0,000%		
4	Perumahan Rakyat	1 Hunian Untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	$\frac{\text{jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022}}{\text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022}} \times 100$	$\frac{15,00 \times 100}{15,00} = 0,000\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		2 Fasilitas Hunian Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100$	$\frac{0,00}{0,00} \times 100 = 0,000\%$		
		3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten}} \times 100$	$\frac{229,53}{359,46} \times 100 = 63,854\%$		
		4 Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{jumlah total unit rumah kabupaten}} \times 100$	$\frac{12929,00}{61584,00} \times 100 = 20,994\%$		
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{jumlah unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{621,00}{621,00} \times 100 = 100,000\%$		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	$\frac{13}{13} \times 100 = 100,000\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		2 Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan PERDA dan PERKADA yang memuat sanksi}} \times 100$	$\frac{5}{5} \times 100 = 100,000\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		SUMBER DATA	KET.
		3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,000% $\frac{190.334}{190.334} \times 100$		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			$\times 100$				
		4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{1.268}{271.584} \times 100$ 0,467%			
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				
		5 jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{31.869}{31.869} \times 100$ 100,000%			
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana				
		6 persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan	$\frac{29}{29} \times 100$ 100,000%			
			$\times 100 \%$				
			jumlah kebakaran di kabupaten				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		7 waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	4,78		
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti x 100	652 X100 1.130	57,699%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten			
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun x 100	133 X100 31.869	0,417%	
			populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
7	Tenaga Kerja	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD x 100	5 X100 5	100,000%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten			
		2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi x 100	583 X100 20.344	2,866%	
			jumlah tenaga kerja keseluruhan			
		3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB per tahun berjalan (atas dasar harga konstan) x 100	7.118.700.000 X100 20.344	34991643,728%	
			jumlah tenaga kerja			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100$	$\frac{166}{318} \times 100 = 52,201\%$		
		5 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	$\frac{\text{jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	$\frac{45}{94} \times 100 = 47,872\%$		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100$	$\frac{1.411.958.883.566}{1.411.958.883.566} \times 100 = 100,000\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100$	$\frac{8}{8} \times 100 = 100,000\%$		
		3 Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100$	$\frac{13}{132.242} \times 100.000 = 11,541$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
9	Pangan	1 Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras /jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{jumlah cadangan pangan}}{\text{jumlah kebutuhan pangan}} \times 100$	$\frac{0}{50,12} \times 100 = 0,000\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Belum ada PERDA Cadangan Pangan
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100$	$\frac{77148}{77148} \times 100 = 100,000\%$	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		2 Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{jumlah kebutuhan tanah untuk fasilitas umum}} \times 100$	$\frac{13519}{13519} \times 100 = 0,000\%$		
		3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100$	$\frac{10300}{10300} \times 100 = 0,000\%$		
		4 Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimun dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100$	$\frac{-}{-} \times 100 = \#DIV/0!$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		5 Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100$	$\frac{1122}{4000} \times 100 = 28,050\%$		
		6 Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100$	$\frac{4}{4} \times 100 = 100,000\%$		
	11 Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	80,15 58,89 94,76 89,63 80,15	Dinas Lingkungan Hidup	
		2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten}} \times 100$	$\frac{22.029}{115.152} \times 100 = 19,130\%$		
		3 Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten}}{\text{usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100$	$\frac{0}{30} \times 100 = 0,000\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	$\frac{489.986}{194.049} \times 100$	252,506%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas Kabupaten			
		2 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	$\frac{48.639}{72.602} \times 100$	66,994%	
			jumlah anak usia 0 - 17 tahun			
		3 Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 -18 Tahun yang sudah memiliki akta kelahiran	$\frac{76.074}{77.390} \times 100$	98,300%	
			jumlah anak usia 0 - 18 tahun			
		4 Jumlah Perangkat Daerah yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{11}{50} \times 100$	22,000%	
			Jumlah Perangkat Daerah			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun	$\frac{9}{9} \times 100$	100,000%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			jumlah desa tertinggal per awal tahun 2022			
		2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun	$\frac{3}{140} \times 100$	2,143%	
			jumlah desa berkembang per awal tahun 2022			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (angka kelahiran total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran menurut kelompok umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i = 1 untuk kelompok umur 15-19, 1 = 2 untuk kelompok umur 20-24, i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000	1,6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Rate/mCPR)	jumlah peserta KB aktif modern $\frac{\text{jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	$\frac{35.439}{48.746} \times 100 = 72,701\%$		
		3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani $\frac{\text{jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	$\frac{5.793}{48.746} \times 100 = 11,884\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
15	Perhubungan	1 Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pd kab. tsb) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penye-berangan yg beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tsb)	81,30 0,730 1,000	Dinas Perhubungan	
		2 Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio Jalan Kabupaten	0,450%		
16	Komunikasi dan Informatika	1 persentase perangkat daerah yg terhubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{1}{50} \times 100$ 2,000%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		2 persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi x 100 Jumlah layanan Publik	$\frac{2}{14} \times 100$ 14,286%		
		3 persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten x 100 jumlah penduduk	$\frac{190.334}{190.334} \times 100$ 100,000%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan aset $\times 100$	$\frac{37}{139} \times 100$	26,619%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			jumlah seluruh koperasi			
		2 meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\times 100$	$\frac{2.635}{10.384} \times 100$	25,376%	
			jumlah usaha mikro keseluruhan			
18	Penanaman Modal	1 persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021) di kabupaten $\times 100$	$\frac{(1404,138-2974,385)}{2.974} \times 100$	-52,799%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten			
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1 tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten $\times 100$	$\frac{477}{67.817} \times 100$	0,703%	
			jumlah pemuda di kabupaten			
		2 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten $\times 100$	$\frac{884}{67.817} \times 100$	1,304%	
			jumlah pemuda di kabupaten			
		3 peningkatan prestasi olahraga	jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional dan internasional	39		
20	Statistik	1 persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\times 100$	$\frac{50}{50} \times 100$	100,000%	
			Jumlah Perangkat Daerah			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		2 persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	$\frac{50}{50} \times 100 = 100,000\%$		
21	Persandian	1 tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{jumlah area penilaian}} \times 100$	$\frac{34}{645} \times 100 = 0,000\%$	Dins Kominfo	
22	Kebudayaan	1 tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	$\frac{13}{13} \times 100 = 100,000\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1 nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	51,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2 indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat $= \frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$	58,36		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
24	Kearsipan	1 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75		
		2 tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	50		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
25	Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	56961,062	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1 persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	jumlah wisatawan tahun 2023 - jumlah wisatawan tahun 2021 $\times 100$ jumlah wisatawan tahun 2022	(9821-4663) x100 18308	110,615%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2 Persentase peningkatan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	jumlah wisatawan tahun 2022 - jumlah wisatawan tahun 2021 $\times 100$ jumlah wisatawan tahun 2021	(49038-18308) x100 18308	167,850%	
		3 tingkat hunian akomodasi	jumlah kamar yang terjual $\times 100$ jumlah kamar yang tersedia	35470 x100 210240	16,871%	
		4 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten (harga berlaku)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,912%		
		5 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten (harga berlaku)	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			
27	Pertanian	1 produktivitas pertanian per hektar per tahun	jumlah produksi pertanian pangan perhektar per tahun $\times 100$ Luas Panen	42.032,00 x100 18.663	225,216%	Dinas Pertanian dan Pangan
		2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	jumlah kejadian penyakit tahun 2022 - jumlah kejadian/ kasus penyakit tahun 2021 $\times 100$ jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2021	187-451 x100 451	-58,537%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
28	Perdagangan	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dgn ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Swalayan) Toko	$\frac{\text{jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{jumlah pelaku usaha di kabupaten}} \times 100$	$\frac{2635}{10384} \times 100$ 25,376%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2 Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100$	$\frac{631600}{766356} \times 100$ 82,416%		
		3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun 2022}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100$	$\frac{507}{2188} \times 100$ 23,172%		
		1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023- jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}} \times 100$	$\frac{(2777-2630)}{2630} \times 100$ 5,892%		
		2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	30%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawas-an dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100$	$\frac{147 \times 100}{417}$ 35,252%		
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawas-an dgn jumlah izin Perluasan industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100$	$\frac{0 \times 100}{0}$ 0,000%		
		5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawas-an dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100 \%$	$\frac{0 \times 100}{0}$ 0,000%		
		6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%), 7-12 bulan (25%), tidak menyampaikan (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%), bahan baku dan bahan penolong (10%)	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
30	Perencanaan dan Keuangan 9.462.994,29 9.462.994.290.000,00	1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Jumlah APBD*	$\frac{161.889.046.377,00}{1.711.167.248.686,10} \times 100$ 9,461%	Badan Keuangan Daerah	
		2 Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah PDRB Non Migas x 100	$\frac{73.399.678.892,73}{1.723.714.070.976,10} \times 100$ 4,258%	Badan Keuangan Daerah	
		3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	Inspektorat Kabupaten	
		4 peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	Inspektorat Kabupaten	
		5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures Jumlah belanja APBD x 100	$\frac{938.463.242.443,47}{1.711.167.248.686,10} \times 100$ 54,843%	Badan Keuangan Daerah	
		6 Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
31	Pengadaan	1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan x 100 nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
			$\frac{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022}}{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022}} \times 100$	0,00 x100 7.394,00 0,000%		
		2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah Pengadaan yang Dilakukan x 100 % Dengan Metode Kompetitif			
			$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan tanpa Metode Kompetitif}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan tanpa Metode Kompetitif}} \times 100$	4.352,00 x100 7.394,00 58,859%		
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	jumlah nilai belanja langsung yang x 100 melalui pengadaan			
			$\frac{\text{total belanja langsung}}{\text{total belanja langsung}} \times 100$	690.369.167.466,30 x100 1.357.558.077.228,20 50,854%		
		4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021			
			$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021}} \times 100$	187.455.944.547,0 x100 234.187.034.086,0 80,045%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
32	Kepegawaian	1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	3561	82,107%	BKPSDM
			Jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	4337		
		2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	32	2,542%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1259		
		3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	85	26,480%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	321		
33	Manajemen Keuangan	1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	1.711.167.248.686	4,434%	Badan Keuangan Daerah
			total belanja APBD	1.638.517.086.601		
		2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	73.399.678.893	4,998%	Badan Keuangan Daerah
			Total PAD dalam APBD	69.905.933.416		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET.
		3 Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	Badan Keuangan Daerah	
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya		
			Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ya		
			Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	ya		
		4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100$	$\frac{26.222.444.505,53}{1.586.875.833.818} \times 100$	1,652%	
34	Transparansi dan Partisipasi Publik	1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	207.422.420.570,95	x100	88,781%
			realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	233.633.087.749		
		2 akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan x 100 di website pemda	121,00	x100	76,101%
			Total jumlah dokumen yang sudah dirinci	159		

